

EKOSISTEM PENGETAHUAN INOVASI

PUSAT INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2024

PENYUSUNAN
EKOSISTEM PENGETAHUAN INOVASI

Lembaga Administrasi Negara
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Pusat Inovasi Administrasi Negara
2024

EKOSISTEM PENGETAHUAN INOVASI

Pengarah :

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.

Penanggungjawab :

Hartoto, S.I.P., M.Si.

Tim Penulis:

Antun Nastri Sidik Rahaji K, S.IP., M.Si., Dian Eka Rahayu Sawitri, SH., MH., Hesti Annisa, S.A.P., M.Si., Rahayu Eka Putri, S.IP.

ISBN :

Editor :

Hartoto, S.I.P., M.Si., Antun Nastri Sidik Rahaji K, S.IP., M.Si.,

Desain Sampul :

Rahayu Eka Putri, S.IP.

Layout :

Rahayu Eka Putri, S.IP.

Tim Sekretariat :

Eron Gustaman, S.Pd., Suwanto, Angger Wijaya Putra, A.Md.Ak.

Penerbit :

Pusat Inovasi Administrasi Negara (PIAN)

Redaksi :

Pusat Inovasi Administrasi Negara (PIAN)

Kedeputan Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jalan Veteran No 10, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 3868201-5, Fax. (021) 3800187

Email : pusatinovasi.lanri@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2024

Hak Cipta pada © Pusat Inovasi Administrasi Negara – LAN

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan tuntutan kemajuan teknologi, kita tak dapat menutup mata terhadap pentingnya ekosistem pengetahuan inovasi di lingkungan pemerintahan. Merupakan hal yang penting untuk membangun fondasi pengetahuan dan inovasi yang kokoh dalam menyongsong masa depan yang semakin baik, terlebih dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ekosistem pengetahuan inovasi di pemerintahan diharapkan tidak lagi hanya sekadar konsep, tetapi menjadi sebuah keharusan yang mendesak. Inovasi tak hanya mencakup penggunaan teknologi terkini, tetapi juga mencakup cara-cara baru berpikir, solusi kreatif, dan pendekatan yang cerdas dalam mengatasi tantangan yang kompleks. Dalam konteks pemerintahan, hal ini tak hanya membawa kemajuan, tetapi juga menunjukkan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah yang progresif dan berfokus pada inovasi adalah pemerintah yang mampu merespon perubahan dengan cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, dan memberikan solusi yang efektif untuk berbagai masalah yang dihadapi. Sebuah ekosistem pengetahuan yang kuat memungkinkan para pemangku kebijakan untuk terus memperbarui wawasan mereka, memanfaatkan teknologi terbaru, dan berkolaborasi untuk menciptakan solusi yang lebih baik.

Dalam era di mana informasi menjadi aset terpenting, pemerintah harus menjadi pemimpin dalam mengumpulkan, menyusun, dan memanfaatkan pengetahuan. Ini bukan hanya tentang pengelolaan data, tetapi juga tentang membangun budaya kolaborasi, mendukung inovasi

dan pengembangan, dan menciptakan platform untuk pertukaran ide yang produktif.

Melalui ekosistem pengetahuan inovasi, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat fondasi pengetahuan inovasi di lingkungan pemerintahan kita. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Muhammad Taufiq



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah-Nya kegiatan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara dengan fokus Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang dipercayakan pada LAN RI, sebagai wujud keberpihakan LAN dalam mengakselerasi tata kelola pemerintahan dan perbaikan kualitas pelayanan Publik. Terdapat 2 (dua) fokus aktivitas pada Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, meliputi Penyusunan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi level Mikro dan Penyusunan Direktori Inovasi. Kedua capaian tersebut merupakan satu paket rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk terus mendorong pengembangan inovasi daerah di Indonesia.

Kegiatan Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi berjalan dengan baik karena kerjasama yang terjalin dengan berbagai pihak, yaitu Deputy Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri – Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pihak lain yang telah memberikan dukungan untuk lancarnya kegiatan ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan dengan baik.

Sebagai upaya Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi kedepannya, tentu masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, kami sangat terbuka atas masukan konstruktif dari *stakeholders* untuk peningkatan efektivitas kegiatan di tahun mendatang.

Jakarta, Desember 2024

Tri Widodo Wahyu Utomo

RINGKASAN

Maksud penyusunan Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi ini adalah LAN ingin mendorong pertumbuhan inovasi lebih merata di seluruh daerah. Ekosistem pengetahuan inovasi merujuk pada suatu lingkungan dimana pengetahuan dibagikan, dikelola dan digunakan oleh individu, kelompok atau organisasi.

Materi Ekosistem Pengetahuan Inovasi yang disusun pada Tahun 2024 ini meliputi 2 (dua) hal yaitu **Direktori Inovasi** dan **Pengembangan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi**.

Terdapat 2 (dua) inovasi pada level Pemerintah sebagai output penyusunan Direktori Inovasi, yaitu Inovasi “Satu Sehat” yang sebelumnya dikenal dengan nama Peduli Lindungi dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) “E-Procurement”.

Inovasi Satu Sehat dikembangkan oleh Kemenkes RI yang merupakan transformasi dari inovasi PeduliLindungi yang pada awalnya dikembangkan sebagai instrumen tracking penyebaran Covid-19. PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT Mobile pada 1 Maret 2023. Dari yang semula terbatas pada fungsi pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, SATUSEHAT Mobile menjadi aplikasi kesehatan masyarakat dengan menambahkan berbagai fitur penunjang kesehatan personal dan gaya hidup sehat lainnya yang datanya bersumber dan terintegrasi dengan rekam medis elektronik (RME) melalui SATUSEHAT Platform. Transformasi ini didorong atas semangat dan upaya Kemenkes RI dalam melakukan digitalisasi dan integrasi demi menghadirkan kemudahan akses atas data kesehatan pribadi untuk masyarakat. Dengan hadirnya SATUSEHAT Mobile, kini masyarakat dapat merasakan berbagai manfaat, salah satunya mudahnya dalam mengakses hasil pemeriksaan medis dan hasil laboratorium dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terintegrasi melalui fitur Resume Medis.

Inovasi Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) “E-Procurement” adalah sistem yang mendukung proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah. Terdapat beberapa fitur utama dari LPSE yaitu : (1) SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): SIRUP adalah sistem yang berfungsi untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda); (2) Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Aplikasi SPSE adalah

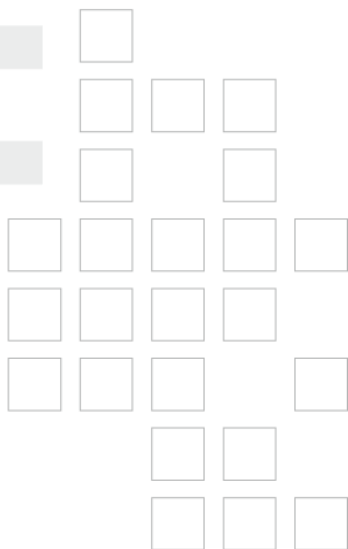
sistem yang digunakan dalam proses pengadaan dengan berbagai metode pemilihan, seperti Tender/Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat; (3) E-Katalog (Katalog Elektronik): E-Katalog adalah sistem yang menampilkan produk-produk yang disediakan oleh penyedia barang/jasa yang telah terdaftar; (4) Toko Daring: Toko Daring adalah sistem yang terintegrasi dengan marketplace umum, yang memungkinkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan untuk langsung membeli barang/jasa dari platform marketplace yang tersedia; (5) SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia): SIKAP adalah aplikasi untuk mengelola data para penyedia barang/jasa yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah; (6) INAPROC (Indonesia National Procurement Portal): INAPROC adalah portal pengadaan nasional yang menjadi pintu gerbang utama bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengadaan barang/jasa di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

Pengembangan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi (level mikro) ditujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas implementasi inovasi daerah. Penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi di tingkat mikro menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk menyediakan alat bantu yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi, menilai, dan mengukur dampak langsung dari inovasi terhadap capaian kinerja kegiatan. Dengan instrumen ini pemerintah daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) inovator dapat memahami sejauh mana inovasi yang diinisiasi memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi level mikro yang dikembangkan, akan difokuskan pada variabel dan indikator berdasarkan komponen dalam pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu faktor input, faktor proses, faktor output, dan faktor outcome tingkat 1 (*immediate outcome*), sebagai berikut: (1) Faktor Input Kegiatan, yaitu kebutuhan sumber daya Anggaran OPD; Personil OPD untuk pelaksanaan kegiatan rutin, jumlah stakeholders terlibat kegiatan; (2) Faktor Proses Kegiatan, yaitu Jumlah prosedur pada pelaksanaan kegiatan rutin, waktu yg diperlukan pada setiap tahap prosedur; (3) Faktor Output Kegiatan, yaitu Jumlah produk keluaran/hasil; jumlah penerima produk keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan rutin; dan (4) Faktor Outcome Kegiatan Tingkat I (*Immediate outcome*), yaitu Value yang diperoleh/dirasakan oleh Masyarakat penerima layanan atau hasil

kegiatan, seperti Cheaper (lebih murah), Faster (lebih cepat), Easier (lebih mudah), dan Smarter (lebih cerdas).

Agar inovasi sektor publik di Indonesia semakin membaik, maka, direkomendasikan pada Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk : (1) memanfaatkan bahan ekosistem pengetahuan inovasi yang telah dihasilkan untuk diimplementasikan untuk mendorong dan percepatan pengembangan inovasi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarluaskan dan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan bahan-bahan ekosistem pengetahuan inovasi yang telah ada; (2) Menyiapkan bahan lain terkait ekosistem pengetahuan inovasi yang belum tersedia. Hal ini dilakukan dengan menyusun direktori inovasi atas inovasi-inovasi lainnya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah; dan (3) Mendorong pemanfaatan instrumen pengukuran dampak inovasi untuk mengidentifikasi dampak inovasi yang telah dihasilkan oleh instansi pemerintah, sebagai salah bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kemanfaatan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DIREKTORI INOVASI.....	6
1. INOVASI SATU SEHAT	6
A. Sejarah Pengembangan.....	6
B. Peduli Lindungi Bertransformasi Menjadi Satu Sehat.....	13
C. Dampak Implementasi Satu Sehat.....	18
D. Faktor Keberhasilan Satu Sehat.....	23
E. Permasalahan/Tantangan dan Upaya Mengatasi/ Menghadapinya	27
2. INOVASI “LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	29
A. Sejarah Pengembangan	29
B. Layanan Utama Inovasi LPSE	31
C. Hasil Layanan Inovasi LPSE	32
D. Dampak Layanan Inovasi LPSE	35
E. Faktor Keberhasilan Implementasi LPSE	36
F. Permasalahan dan Tantangan LPSE serta Upaya untuk Mengatasi .	39
BAB III INSTRUMEN PENGUKURAN DAMPAK INOVASI	41
A. Pengantar	41
B. Urgensi Pengukuran Dampak Inovasi (level Mikro)	42
C. Bentuk Inovasi Berdasarkan PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	48
D. Dampak Ultimate yang Diharapkan dari Inovasi Daerah	49
E. Kerangka Pikir Pengembangan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi Daerah	53
F. Level Pengukuran Dampak Inovasi dan Perbandingan Antar Level	60
G. Fokus Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro	66
H. Deskripsi Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro	70
BAB IV PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

Kunci kemenangan suatu negara/daerah dalam kompetisi global ditentukan kemampuan berinovasi. Dari empat indikator yang disurvei Bank Dunia (1995), Inovasi memiliki pengaruh sebesar 45%, Jejaring 25%, Teknologi 20% dan Sumber Daya Alam hanya 10%, untuk memenangkan persaingan. Berdasarkan data Global Innovation Index Tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 61, posisi ini naik 14 angka dibanding tahun 2022 yang berada pada peringkat 75. Namun demikian, pada kategori wilayah ASEAN, Indonesia masih berada pada peringkat 6. Indeks inovasi Indonesia masih di bawah Singapura (5), Malaysia (36), Thailand (43), Vietnam (46) dan Philipina (56).

**Trend Skor dan Peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index
Tahun 2020-2023**



Walaupun demikian, pertumbuhan inovasi di Indonesia saat ini cukup eksponensial. Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memiliki catatan perkembangan inovasi daerah dan pusat berbeda-beda, hal ini disebabkan karena indikator yang digunakan berbeda. Lembaga Administrasi Negara mencatat telah menghasilkan 13.072 ide inovasi dari 119 Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) yang difasilitasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Ide inovasi tersebut dihasilkan secara co-creation melalui kegiatan Laboratorium Inovasi (Labinov) yang menggunakan metode 5D + 1, yaitu Drum Up, Diagnose, Design, Deliver, Display serta Documentation. Sedangkan catatan Kemendagri berdasarkan atas jumlah proposal yang masuk dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan catatan KemenPANRB berdasarkan dari jumlah proposal yang diikuti sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

IGA 2018-2023			KIPP 2018-2023		
Tahun	Jumlah Pemda	Jumlah Inovasi	Tahun	Jumlah Proposal	Lolos Penilaian
2018	188	3.718	2018	2.824	1.463
2019	260	8.016	2019	3.156	1.329
2020	484	17.779	2020	2.303	2.245
2021	542	25.124	2021	3.178	1.619
2022	509	26.900	2022	3.478	2.454
2023	517	26.539	2023	2.269	2.135
Total		108.076	Total	17.208	11.245

Sumber: BPP Kemendagri & Kemenpan RB (diolah)

Berdasarkan hal tersebut LAN ingin mendorong pertumbuhan inovasi lebih merata di seluruh daerah dengan membuat ekosistem pengetahuan inovasi. Ekosistem pengetahuan inovasi merujuk pada suatu lingkungan dimana pengetahuan dibagikan, dikelola dan digunakan oleh individu, kelompok atau organisasi. Ekosistem pengetahuan inovasi tidak hanya merupakan entitas statis tetapi didalamnya juga terdapat interaksi dinamis.

Pada tahun 2023 LAN telah mengembangkan platform InoLand sebagai wadah bagi ekosistem pengetahuan inovasi. Pengetahuan yang diproduksi adalah materi pembelajaran Labinov yang sesuai tahapan 5D + 1, yaitu drum up, diagnose, design, deliver, display dan documentation. Dalam InoLand juga terdapat direktori inovasi yang merupakan cerita perjalanan inovasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Direktori inovasi adalah salah satu bentuk publikasi praktik baik inovasi yang telah dilakukan oleh Indonesia sehingga dapat diketahui oleh publik. Di tahun 2023 kami telah merangkum perjalanan Laboratorium Inovasi yang dilaksanakan oleh LAN dan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian PANRB. Platform ini juga mengakomodir interaksi antara LAN dengan Pemerintah Daerah yang menjadi mitra sehingga dapat berdiskusi mengenai usulan ide inovasi, penyusunan rencana aksi inovasi dan lain sebagainya.

Ekosistem pengetahuan inovasi ini merupakan kegiatan *multi years* sehingga di Tahun 2024 dilanjutkan dengan Penyusunan direktori inovasi perjalanan layanan kesehatan terintegrasi “Satu Sehat” yang sebelumnya dikenal dengan nama Peduli Lindungi dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) “E-Procurement”. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu aplikasi kesehatan terbesar di dunia dan berperan penting dalam menangani pandemi COVID 19 di Indonesia. E-procurement adalah salah satu terobosan pemerintah dalam pembelian baik barang maupun jasa. Sebelumnya pengadaan baik barang maupun jasa di lingkungan pemerintahan dilakukan secara

konvensional. Hal ini tentunya memunculkan permasalahan yaitu kurang efisien dari sisi pembiayaan, waktu dan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk praktek KKN salah satunya kompromi dalam hal pengadaan baik barang maupun jasa. E-proc menjadikan proses pengadaan baik barang maupun jasa menjadi lebih efektif, efisien dan transparan yaitu prosesnya pengadaannya lebih cepat, tepat dan transparan.

Pengetahuan lain yang diproduksi adalah Penyusunan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi. Melalui Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi maka dapat dinilai sejauh mana inovasi berhasil mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan serta dapat diidentifikasi area yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan dalam inovasi yang telah dilakukan. Instrumen pengukuran dampak inovasi dipersiapkan dalam rangka menyambut periode pemerintahan baru. Hal ini bertujuan membantu pemerintah baru untuk menilai kebijakan inovatif yang telah dilakukan dan merancang strategi inovasi sesuai dengan visi misi serta agenda pemerintahan baru.

Direktori Inovasi

Direktori Inovasi yang dihasilkan merupakan gambaran singkat mengenai informasi profil inovasi yang telah dihasilkan dan menjadi contoh praktek terbaik inovasi yang dikembangkan di Indonesia. Informasi profil inovasi yang dituliskan dalam Direktori, meliputi informasi tentang:

- Sejarah Pengembangan, yang meliputi informasi Latar Belakang, Dasar Hukum, dan Stakeholders
- Layanan Utama, yang meliputi informasi Fitur Layanan, dan Pengembangan
- Hasil dan Dampak, yang meliputi informasi Hasil Layanan, dan Dampak Layanan
- Faktor Keberhasilan, dan

- Permasalahan/Tantangan dan Upaya Mengatasinya

Terdapat 2 (dua) inovasi pada level Pemerintah sebagai output penyusunan Direktori Inovasi, yaitu Inovasi “Satu Sehat” yang sebelumnya dikenal dengan nama Peduli Lindungi dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (LPSE) “E-Procurement”.

Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi

Instumen Pengukuran Dampak Inovasi yang dihasilkan berupa sebuah instrumen bantu sederhana berbasis Microsoft Excel untuk mengidentifikasi dampak inovasi pada level mikro, yaitu dampak inovasi dilakukan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi ini merupakan upaya pengembangan dari Instumen Pengukuran Dampak Inovasi yang telah dikembangkan sebelumnya pada Tahun 2018.

Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi ini dikembangkan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas implementasi inovasi daerah, terutama inovasi di tingkat mikro yang merupakan salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Instrumen ini dirancang untuk menyediakan alat bantu yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi, menilai, dan mengukur dampak langsung dari inovasi terhadap capaian kinerja kegiatan. Dengan pendekatan PDI, pemerintah daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) inovator dapat memahami sejauh mana inovasi yang diinisiasi memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan yang ingin dicapai.

BAB II

DIREKTORI INOVASI

Terdapat 2 (dua) inovasi pada level Pemerintah sebagai output penyusunan Direktori Inovasi, yaitu Inovasi “Satu Sehat” dan Inovasi “Layanan Pengadaan Secara Elektronik”.

Informasi profil inovasi yang dituliskan dalam Direktori, meliputi informasi tentang:

- Sejarah Pengembangan, yang meliputi informasi Latar Belakang, Dasar Hukum, dan Stakeholders
- Layanan Utama, yang meliputi informasi Fitur Layanan, dan Pengembangan
- Hasil dan Dampak, yang meliputi informasi Hasil Layanan, dan Dampak Layanan
- Faktor Keberhasilan, dan
- Permasalahan/Tantangan dan Upaya Mengatasinya

1. INOVASI “SATU SEHAT”

A. Sejarah Pengembangan

Pada tahun 2020, awal mula pandemi COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Virus ini membawa dampak signifikan ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari sistem kesehatan diuji, aktivitas ekonomi terhambat, dan ketidakpastian situasi yang mengkhawatirkan masyarakat dalam beraktivitas. Setiap hari muncul berita penularan virus yang makin meluas ke berbagai daerah dan segala usia. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan untuk menghambat penularan COVID-19.

Dalam situasi ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melahirkan Aplikasi Peduli Lindungi pada 1 Juli 2021 sebagai respons

sigap dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dan melindungi masyarakat. Peduli Lindungi bukan hanya aplikasi untuk melacak kontak, tetapi aplikasi ini menjadi sumber informasi terpercaya seputar COVID-19 terkait pencegahan, gejala, perawatan, panduan protokol kesehatan, vaksinasi, dan layanan lainnya mengenai COVID-19. Aplikasi Peduli Lindungi juga menjadi jembatan untuk masyarakat agar dapat mengunjungi tempat layanan publik, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat umum lainnya dengan syarat kelengkapan status vaksinasi.

Sejarah Transformasi Journey Menuju Satu Sehat Mobile

Kemenkes RI resmi mentransformasikan PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT Mobile pada 1 Maret 2023. Dari yang semula terbatas pada fungsi pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19, SATUSEHAT Mobile menjadi aplikasi kesehatan masyarakat dengan menambahkan berbagai fitur penunjang kesehatan personal dan gaya hidup sehat lainnya yang datanya bersumber dan terintegrasi dengan rekam medis elektronik (RME) melalui SATUSEHAT Platform.

Transformasi ini didorong atas semangat dan upaya Kemenkes RI dalam melakukan digitalisasi dan integrasi demi menghadirkan kemudahan akses atas data kesehatan pribadi untuk masyarakat. Dengan hadirnya SATUSEHAT Mobile, kini masyarakat dapat merasakan berbagai manfaat, salah satunya mudahnya dalam mengakses hasil pemeriksaan medis dan hasil laboratorium dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terintegrasi melalui fitur Resume Medis.

Pengembangan Sistem dan Fitur Layanan Peduli Lindungi dalam menghadapi pandemi

a. Screening

Scan QR Code untuk melakukan screening dan tracing secara digital. Termasuk kerjasama juga dengan lebih dari 80 aplikasi (KMK No.HK.01.07 Menkes-5680-2021)

b. Electronic Health Alert Recocrd (eHAC)

eHAC sebagai alat pendukung pemerintah untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19 oleh para pemudik.

c. Covid-19 Testing

Hasil tes PCR/Antigen pengguna terhubung langsung ke sistem input laboratorium melalui NAR, riwayat hasil tes COVID-19 dalam 10 hari terakhir

d. Vaksinasi COVID-19

Tiket vaksin dosis ketiga (booster), Lokasi vaksin terdekat, Vaksin terintegrasi dengan sistem PCare dan KPCPEN

e. Sertifikat Vaksinasi

Format Internasional: World Health Organization (WHO), European Union (EU), Kingdom of Saudi Arabia (KSA). Untuk memudahkan aktivitas perjalanan internasional

f. Ketersediaan Bed RS

Terhubung dengan SIRANAP untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur RS secara real-time

g. Telemedisin

Akses obat untuk isolasi mandiri. Terintegrasi dengan 17 Penyedia Layanan Telemedisin yang bekerjasama dengan Kemenkes

h. Sijejak (Digital Tracing)

Fitur pelacakan kontak yang memanfaatkan pertukaran sinyal Bluetooth dari jarak dekat untuk mengidentifikasi kontak erat secara anonim

Tidak hanya terbatas pada fitur COVID-19, PeduliLindungi juga ditambahkan dengan fitur dan fungsi berguna lainnya, seperti penambahan opsi 13 bahasa, riwayat dan sertifikat digital imunisasi anak yang terintegrasi dengan ASIK, banner promosi kesehatan, hingga daftar nomor darurat.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Peduli Lindungi

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Aplikasi Peduli Lindungi, sejak pembentukannya dalam menangani pandemi adalah:

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmenkominfo) Nomor 171 Tahun 2020
Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Aplikasi PeduliLindungi sebagai infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi guna mendukung penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmenkominfo) Nomor 253 Tahun 2020
Kepmenkominfo Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Peduli Lindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Mencakup penambahan fitur dan ketentuan baru terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pengembangan PeduliLindungi.

Dalam implementasinya, PeduliLindungi telah berperan dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Namun, untuk mendukung transisi menuju kebiasaan baru, perlu dilakukan optimasi lebih lanjut pada aplikasi ini.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Transformasi Menuju Satu Sehat

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Implementasi Satu Sehat dalam mengembangkan sistem layanan kesehatan yang berkelanjutan adalah:

- a. Kewajiban Integrasi ke SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) sesuai UU No. 17 Tahun 2023

Integrasi dengan SATUSEHAT merupakan kewajiban sebagai langkah kolaboratif pemerintah bersama sarana pelayanan kesehatan untuk mendorong akselerasi transformasi teknologi kesehatan dan interoperabilitas data kesehatan. Terdapat sanksi administratif apabila lalai dalam melaksanakan integrasi

- b. Penguatan Visi melalui SE No.HK.02.01/MENKES/1030/2023

Surat Edaran ini bertujuan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik dan melakukan integrasi dengan Platform SATUSEHAT sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Sanksi administratif dapat dikenakan apabila penyelenggaraan RME tidak dilaksanakan, mulai dari teguran tertulis, rekomendasi penyesuaian status akreditasi, hingga rekomendasi pencabutan status akreditasi.

Dalam implementasinya, Satu Sehat berkomitmen terhadap keamanan dan perlindungan data bagi para penggunanya. Pada Aplikasi SATUSEHAT Mobile terdapat syarat mengakses informasi data kesehatan pribadi untuk menjamin keamanan dan melindungi data pengguna SATUSEHAT Mobile. Selain dengan enkripsi dan masking data, verifikasi profil (centang biru) perlu dilakukan dengan menggunakan OTP dan PIN. Verifikasi profil harus melalui proses Know Your Customer (KYC) yang dilakukan oleh petugas kesehatan dengan mencocokkan data profil yang tertera di aplikasi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Fitur Resume medis terintegrasi dengan SATUSEHAT Platform yang kemanannya telah diakui oleh nasional hingga internasional (lebih dari 100 negara) melalui sertifikasi ISO/IEC 27799:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO/IEC 27799:2016 terkait Manajemen Keamanan Informasi Kesehatan.

Para Pemangku Kepentingan terkait Peduli Lindungi

Para pemangku kepentingan yang merupakan penerima manfaat dari kegiatan ini dibedakan menjadi dua yakni penerima manfaat langsung dan tidak langsung. Penerima manfaat langsung adalah Stakeholders yang berperan dalam membantu mengembangkan inovasi, diantaranya:

- 1) PT Telkom Indonesia
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 3) Kementerian Kesehatan
- 4) Kementerian Dalam Negeri
- 5) Badan Siber dan Sandi Negara

Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah instansi terkait yang berperan dalam membantu memanfaatkan inovasi:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) BPJS Kesehatan
- 4) Kementerian/Lembaga terkait lainnya

Dampak dan Keberhasilan Peduli Lindungi

Fitur layanan aplikasi PeduliLindungi memiliki beberapa fitur yang berdampak positif dalam mengurangi persebaran Covid-19. Dengan dilakukan pelacakan kasus, tracing kontak, dan peringatan pada pengguna, petugas kesehatan dapat melacak riwayat perjalanan dan kontak erat pasien Covid-19 dengan mudah dan cepat. Petugas terbantu

untuk mengidentifikasi potensi penularan dan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan adanya peringatan apabila berada di tengah keramaian atau kawasan zona merah dan apabila di sekitar kawasan terdapat individu yang terinfeksi atau pasien Covid-19 yang sedang dalam pengawasan. Sehingga petugas dapat mengetahui riwayat kontak erat, sehingga dapat dilakukan tes dan karantina kepada individu lain yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 selama 14 hari sebelumnya.

Aplikasi PeduliLindungi juga dapat memastikan individu telah melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu vaksinasi lengkap atau hasil tes yang negatif untuk bisa memasuki tempat umum. Sehingga risiko penularan di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan dan transportasi publik dapat diminimalisir. Masyarakat juga teredukasi dengan informasi kesehatan yang disediakan terkait protokol kesehatan, gejala virus, dan lokasi vaksinasi. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Covid-19 untuk lebih menerapkan protokol kesehatan yang benar serta mengikuti program vaksinasi.

Fitur layanan yang diberikan berdampak juga dapat memperpanjang masa perlindungan COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 dengan cara dilakukannya percepatan vaksinasi. Berdasarkan data Kemenkes, selama tahun 2021- 2022 aplikasi PeduliLindungi berhasil mencegah lebih dari 3 juta orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) yang mengunjungi tempat umum dan lebih dari 500 ribu orang dengan status hitam (terinfeksi Covid-19) yang mengakses tempat umum tertutup dan melakukan perjalanan domestik.

Aplikasi PeduliLindungi berhasil meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2022. Hal ini merupakan hasil dari dedikasi karyawan dan mitra yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengembangkan aplikasi ini selama masa pandemi. Keberhasilan aplikasi PeduliLindungi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya aplikasi ini memiliki kualitas sistem dan informasi yang

baik. Aplikasi PeduliLindungi ini mudah digunakan dengan memiliki sistem yang andal dan data yang disajikan akurat. Pelayanan aplikasi ini juga berkualitas, pengguna merasa terbantu dari fitur layanan yang disediakan dan dapat diakses dengan mudah sehingga membuat pengguna merasa puas dengan aplikasi ini.

Banyaknya pengguna yang memanfaatkan aplikasi ini untuk kebutuhan sehari-hari juga merupakan bukti dari keberhasilan aplikasi PeduliLindungi. Kebijakan masyarakat untuk wajib menggunakan aplikasi dengan kelengkapan vaksinasi sebagai syarat mengunjungi tempat umum dan syarat untuk bepergian menggunakan transportasi umum menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di masa pandemi. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk divaksin agar kekebalan tubuhnya terbentuk sehingga dapat mengurangi laju penularan Covid-19 serta masyarakat merasa aman dan terlindungi.

B. Peduli Lindungi Bertransformasi Menjadi Satu Sehat

Satu Sehat Dikembangkan sebagai Aplikasi Kesehatan Resmi Kesehatan RI yang menyediakan layanan kesehatan terintegrasi dan personal. Berikut beberapa penjelasan fitur layanan pada Satu Sehat

1) Resume Medis Elektronik:

Fungsi: Menyimpan seluruh riwayat kesehatan Anda secara digital, mulai dari hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosis penyakit, hingga resep obat.

Manfaat:

- Mempermudah akses data kesehatan kapan saja dan di mana saja.
- Membantu dokter memberikan diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat.
- Mencegah duplikasi pemeriksaan yang tidak perlu.

2) **Diari Kesehatan:**

Fungsi: Sebagai catatan pribadi untuk mencatat kondisi kesehatan sehari-hari, seperti gejala yang dirasakan, makanan yang dikonsumsi, hingga aktivitas fisik.

Manfaat:

- Membantu Anda memantau perkembangan kondisi kesehatan secara mandiri.
- Memberikan informasi berharga kepada dokter untuk membantu diagnosis.

3) **Pengingat Minum Obat:**

Fungsi: Mengingatkan Anda untuk meminum obat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Manfaat:

- Memastikan Anda tidak lupa meminum obat dan mendapatkan manfaat pengobatan secara maksimal.
- Mencegah terjadinya efek samping akibat lupa atau kelebihan dosis obat.

4) **Vaksin dan Imunisasi:**

Fungsi: Menyimpan catatan riwayat vaksinasi dan imunisasi Anda dan keluarga.

Manfaat:

- Memudahkan Anda untuk mengetahui status imunisasi dan jadwal vaksinasi berikutnya.
- Membantu Anda membuat keputusan yang tepat terkait vaksinasi.

5) **Cari Obat:**

Fungsi: Membantu Anda mencari informasi tentang obat-obatan, termasuk merek, kandungan, dosis, dan efek samping.

Manfaat:

- Mempermudah Anda mencari obat yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan.
- Membantu Anda memahami cara penggunaan obat dengan benar.

6) **Cari Nakes:**

Fungsi: Membantu Anda menemukan tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker) terdekat.

Manfaat:

- Mempermudah Anda mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
- Membantu Anda memilih tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

7) **Berita dan Buletin Kesehatan:**

Fungsi: Menyediakan informasi terkini seputar kesehatan, mulai dari tips menjaga kesehatan, informasi penyakit, hingga perkembangan dunia kesehatan.

Manfaat:

- Meningkatkan pengetahuan Anda tentang kesehatan.
- Membantu Anda menjaga kesehatan diri dan keluarga.

8) **Nomor Gawat Darurat Nasional:**

Fungsi: Menyediakan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat medis.

Manfaat: Memastikan Anda mendapatkan pertolongan pertama dengan cepat saat terjadi keadaan darurat.

9) **Daftar Pelayanan Kesehatan:**

Fungsi: Menyediakan daftar fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas.

Manfaat:

- Mempermudah Anda mencari fasilitas kesehatan terdekat.
- Membantu Anda membandingkan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing fasilitas kesehatan.

10) **Cari Rawat Inap:**

Fungsi: Membantu Anda mencari informasi tentang fasilitas rawat inap di berbagai rumah sakit.

Manfaat:

- Mempermudah Anda mencari rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan.
- Membantu Anda membandingkan biaya dan fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing rumah sakit.

Secara keseluruhan, Aplikasi Satu Sehat bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, mengelola kesehatan pribadi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Para Pemangku Kepentingan terkait Satu Sehat

Aplikasi Satu Sehat merupakan platform integrasi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan kesehatan di Indonesia melalui standarisasi data dan teknologi. Aplikasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dari sektor kesehatan, baik dalam fasilitas kesehatan maupun dalam industri kesehatan. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai stakeholder yang terlibat dalam aplikasi ini:

1) Fasilitas Kesehatan

Pada ranah fasilitas kesehatan, aplikasi Satu Sehat telah diintegrasikan dengan berbagai jenis layanan kesehatan di seluruh Indonesia, dengan jumlah yang sangat signifikan, mencakup:

- Puskesmas dan Posyandu: Lebih dari 10.000 unit puskesmas, termasuk di dalamnya posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.
- Klinik: Terdapat lebih dari 11.000 klinik yang telah terintegrasi, memberikan layanan kesehatan primer kepada masyarakat.
- Praktek Mandiri: Lebih dari 8.000 unit praktek mandiri dokter atau tenaga kesehatan lainnya telah bergabung dalam sistem ini, memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
- Laboratorium: Sebanyak 1.400 unit laboratorium lebih telah terhubung dengan aplikasi ini, mendukung diagnosis dan pemeriksaan kesehatan yang berbasis data terpusat.
- Apotek: Lebih dari 30.000 unit apotek telah menjadi bagian dari integrasi ini, memudahkan pemantauan distribusi obat dan resep secara lebih efisien.

2) Industri Kesehatan

Tidak hanya mencakup fasilitas kesehatan, Satu Sehat juga telah melibatkan industri kesehatan yang lebih luas, meliputi berbagai sistem dan perusahaan yang bergerak di sektor ini. Secara spesifik, aplikasi ini telah terintegrasi dengan lebih dari 100 sistem yang terdiri dari berbagai jenis layanan kesehatan, antara lain:

- Laboratorium: Menyediakan data dan layanan pengujian serta analisis medis.
- Biotech: Industri bioteknologi yang fokus pada inovasi dan teknologi medis.
- Perusahaan Asuransi: Perusahaan yang menawarkan layanan asuransi kesehatan, membantu proses klaim dan verifikasi melalui integrasi data yang lebih mudah.
- Health Tech / Startup: Berbagai perusahaan teknologi kesehatan atau startup yang berfokus pada inovasi di bidang layanan

kesehatan digital, termasuk platform konsultasi, manajemen data pasien, dan teknologi kesehatan lainnya.

Melalui integrasi ini, aplikasi Satu Sehat berperan penting dalam mempermudah koordinasi, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, serta memastikan standar data kesehatan yang seragam di seluruh Indonesia.

C. Dampak Implementasi Satu Sehat

Implementasi aplikasi Satu Sehat telah membawa dampak yang signifikan dalam layanan kesehatan digital di Indonesia. Aplikasi ini berhasil mengintegrasikan data kesehatan secara digital, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang lebih efisien. Berikut ini adalah capaian dan dampak keberhasilan dari aplikasi Satu Sehat:

Capaian Informasi Pengguna

Implementasi aplikasi ini telah mencapai jumlah pengguna yang sangat signifikan dalam kurun waktu tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengguna Aplikasi: Hingga 15 Mei 2024, pengguna aktif aplikasi Satu Sehat mencapai angka 1,1 juta orang. Data ini dihimpun dari periode 17 April hingga 15 Mei 2024, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital kesehatan yang ditawarkan oleh aplikasi ini.
2. Karakteristik Pengguna: Pengguna aplikasi Satu Sehat memiliki karakteristik yang beragam berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia, dengan distribusi sebagai berikut:
3. Jenis Kelamin: 49% pengguna adalah laki-laki, 47% perempuan, dan 4% sisanya tidak diketahui.
4. Kelompok Usia: Pengguna dari kelompok usia 0-5 tahun mencapai 200 ribu orang, usia 6-13 tahun tercatat ada 2 juta orang, sementara kelompok usia 15-19 tahun mencatat jumlah terbesar

dengan 48 juta orang. Pengguna berusia di atas 60 tahun berjumlah 3 juta orang, dan ada 3 juta orang pengguna yang usia mereka tidak diketahui.

5. Fitur yang Paling Banyak Digunakan: Aplikasi Satu Sehat menyediakan berbagai fitur yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Beberapa fitur yang paling banyak digunakan oleh pengguna adalah:
6. Vaksin dan Imunisasi: Digunakan oleh lebih dari 6 juta orang, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi ini dalam mendukung program vaksinasi dan imunisasi.
7. Hasil Tes COVID-19: Sebanyak lebih dari 2 juta orang menggunakan aplikasi ini untuk mengakses hasil tes COVID-19, terutama selama pandemi.
8. Resume Medis: Digunakan oleh lebih dari 2 juta orang, fitur ini membantu pengguna mendapatkan rekam medis secara digital.
9. Pelayanan Kesehatan: Lebih dari 600 ribu orang memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah.
10. Diari Kesehatan: Fitur ini digunakan oleh lebih dari 500 ribu orang, membantu pengguna untuk memantau kondisi kesehatan secara mandiri.

Dampak Keberhasilan Satu Sehat

Terdapat beberapa dampak positif dari Aplikasi Satu Sehat yang telah dikembangkan, antara lain:

1) Kemudahan Akses Layanan Kesehatan

Aplikasi Satu Sehat memberikan dampak positif bagi pengguna dengan kemudahan akses layanan kesehatan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses riwayat kesehatan mereka secara online kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu membawa dokumen fisik yang biasanya diperlukan saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Ini berarti,

informasi penting seperti hasil tes laboratorium, riwayat penyakit, atau jadwal vaksinasi dapat diakses langsung dari ponsel. Fitur ini tentu sangat membantu, terutama dalam keadaan darurat atau ketika pengguna harus mengunjungi rumah sakit di luar kota, di mana akses ke rekam medis sebelumnya sering kali sulit didapatkan.

Kemudahan ini juga tercermin dari data yang menunjukkan tingginya adopsi aplikasi tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 5 juta pengguna telah mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat hingga kuartal ke-3 tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa aplikasi ini telah berhasil memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, di mana banyak pengguna merasa terbantu dengan layanan kesehatan yang lebih efisien dan praktis. Dalam jangka panjang, kemampuan untuk mengakses riwayat medis secara digital akan memperbaiki kualitas interaksi antara pasien dan tenaga medis, sehingga pengobatan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan personal.

2) Peningkatan Koordinasi Antar Fasilitas Kesehatan

Salah satu keunggulan utama dari aplikasi Satu Sehat adalah kemampuannya untuk meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan berbagi data medis antara rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan lebih mudah. Sebelumnya, sering kali terjadi masalah ketika pasien harus berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lain, seperti duplikasi tes medis atau perawatan yang tidak sinkron akibat tidak tersedianya informasi yang lengkap. Dengan Satu Sehat, data pasien dapat diakses secara langsung oleh tenaga medis di mana pun pasien mendapatkan pelayanan, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi perawatan.

Penggunaan aplikasi ini juga terbukti mengurangi duplikasi tes medis yang tidak perlu. Berdasarkan survei internal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penggunaan Satu Sehat telah mengurangi pengulangan tes medis hingga 20%. Hal ini tidak hanya menghemat

biaya bagi pasien, tetapi juga mempercepat proses diagnosis dan pengobatan, karena tenaga medis dapat langsung mengakses riwayat medis pasien dan melanjutkan perawatan tanpa harus mengulang pemeriksaan. Dengan demikian, aplikasi Satu Sehat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional sistem kesehatan di Indonesia.

3) Pengurangan Waktu Tunggu Pasien

Aplikasi Satu Sehat juga memberikan manfaat nyata dalam hal pengurangan waktu tunggu pasien di rumah sakit dan klinik. Melalui fitur pemesanan layanan kesehatan yang lebih cepat, pasien dapat memesan slot pertemuan dengan dokter atau mendapatkan layanan medis secara lebih efisien. Sebelumnya, waktu tunggu yang panjang di fasilitas kesehatan sering kali menjadi masalah bagi pasien, terutama di rumah sakit besar yang memiliki banyak pasien setiap harinya. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi menjadi lebih cepat karena data pasien sudah terintegrasi secara digital, sehingga mengurangi antrean yang biasanya disebabkan oleh proses pendaftaran atau pencarian rekam medis.

Menurut laporan tahunan RSUD Cipto Mangunkusumo pada tahun 2023, waktu tunggu rata-rata pasien berkurang hingga 15% sejak penerapan sistem Satu Sehat. Ini merupakan pencapaian signifikan yang menunjukkan bagaimana aplikasi tersebut membantu mempercepat layanan kesehatan di rumah sakit. Dengan pengurangan waktu tunggu ini, tidak hanya pasien yang merasakan manfaatnya, tetapi juga tenaga medis yang dapat bekerja lebih efisien, karena beban administrasi menjadi lebih ringan. Secara keseluruhan, Satu Sehat berperan dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih responsif dan ramah pasien.

4) Mendukung Upaya Penanggulangan Penyakit

Dalam hal penanggulangan penyakit, aplikasi Satu Sehat menawarkan manfaat yang sangat signifikan dengan integrasi data

epidemiologi secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah dan otoritas kesehatan untuk memantau penyebaran penyakit secara lebih efektif, yang sangat penting dalam menghadapi wabah atau krisis kesehatan masyarakat. Dengan data yang terintegrasi dalam satu platform, respons pemerintah terhadap situasi darurat kesehatan dapat lebih cepat dan terorganisir, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Melalui Satu Sehat, pemerintah dapat dengan mudah melacak penyebaran penyakit, mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi, dan memastikan distribusi vaksin yang lebih efektif.

Pada tahun 2023, aplikasi Satu Sehat digunakan secara ekstensif untuk membantu pemerintah dalam memantau penyebaran COVID-19, termasuk pelacakan kontak dan distribusi vaksin. Aplikasi ini memungkinkan otoritas kesehatan untuk mengumpulkan data dari seluruh Indonesia dan melakukan analisis real-time yang digunakan untuk perencanaan intervensi kesehatan yang lebih baik. Hal ini menjadikan Satu Sehat sebagai alat yang sangat efektif dalam mempercepat respons pemerintah terhadap krisis kesehatan, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan penyakit di masa depan. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada wabah penyakit menular, tetapi juga dapat diterapkan untuk penanganan penyakit kronis dan program kesehatan nasional lainnya.

Aplikasi Satu Sehat memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem kesehatan di Indonesia dengan memudahkan akses layanan, meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan, dan membantu pemerintah dalam pengelolaan data kesehatan nasional. Namun, tantangan seperti privasi data, kesenjangan teknologi, dan literasi digital perlu ditangani agar manfaat aplikasi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Data Pendukung Utama:

- Jumlah pengguna aplikasi Satu Sehat mencapai 5 juta pada 2024.

- Pengurangan waktu tunggu pasien di RSUD sebesar 15% setelah adopsi Satu Sehat.
- Pengulangan tes medis berkurang hingga 20% berkat integrasi data.
- Penetrasi internet pedesaan di bawah 60%, memengaruhi akses aplikasi.

D. Faktor Keberhasilan Satu Sehat

Dalam implementasinya, ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan aplikasi ini.

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Keberhasilan implementasi aplikasi Satu Sehat sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dari pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, memiliki peran strategis dalam merumuskan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan layanan kesehatan. Salah satu kebijakan yang mendasari implementasi aplikasi ini adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan ini menciptakan kerangka hukum untuk sinkronisasi data di berbagai sektor, termasuk kesehatan, dengan tujuan menciptakan integrasi data yang efisien dan akurat di tingkat nasional.

Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan operasional yang memandu rumah sakit, puskesmas, dan klinik untuk mengadopsi aplikasi Satu Sehat. Tanpa kebijakan yang jelas dan dukungan dari para pemangku kepentingan, implementasi aplikasi ini akan sulit berjalan. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara aktif mengawasi dan mendukung implementasi aplikasi ini, terutama dalam mengatasi kendala teknis dan administratif yang mungkin muncul di lapangan.

2. Infrastruktur Teknologi yang Memadai

Infrastruktur teknologi yang memadai merupakan faktor kunci dalam keberhasilan Satu Sehat, mengingat aplikasi ini membutuhkan jaringan internet yang stabil dan perangkat yang kompatibel untuk dapat dioperasikan dengan baik. Salah satu tantangan utama dalam implementasi aplikasi ini adalah disparitas infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19%. Namun, meskipun angka ini terlihat cukup tinggi, masih terdapat tantangan yang signifikan di wilayah-wilayah rural yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan internet berkualitas.

Di daerah perkotaan, aplikasi Satu Sehat mungkin dapat diakses dengan mudah, namun di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses internet, pengguna mungkin akan kesulitan memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan akses internet dan penguatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan fasilitas Wi-Fi publik dan peningkatan jaringan 4G atau 5G, menjadi langkah penting yang harus diprioritaskan agar implementasi aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Pelatihan dan Sosialisasi bagi Tenaga Kesehatan

Untuk memastikan aplikasi Satu Sehat dapat digunakan dengan efektif, pelatihan dan sosialisasi bagi tenaga kesehatan adalah suatu keharusan. Tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun staf administrasi di fasilitas kesehatan, harus memiliki pemahaman yang baik mengenai cara menggunakan aplikasi ini, terutama dalam hal input data pasien, manajemen rekam medis elektronik, dan integrasi dengan sistem kesehatan lainnya.

Kementerian Kesehatan telah menjalankan program pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tenaga medis di seluruh Indonesia mampu memanfaatkan aplikasi Satu Sehat dengan baik.

Berdasarkan data, pelatihan ini telah dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dan mencakup berbagai level fasilitas kesehatan, dari rumah sakit besar di perkotaan hingga puskesmas di daerah terpencil. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis tenaga kesehatan dalam penggunaan aplikasi dan membantu mereka memahami manfaat dari sistem terintegrasi ini bagi pasien dan fasilitas kesehatan itu sendiri. Dengan adanya pelatihan yang tepat, diharapkan penggunaan Satu Sehat dapat menjadi bagian rutin dari praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

4. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi aplikasi Satu Sehat. Tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini sebagai alat pemantau kesehatan, fungsi dari aplikasi tersebut tidak akan maksimal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akses langsung terhadap data kesehatan mereka sendiri melalui aplikasi digital perlu ditingkatkan, khususnya di daerah yang tingkat literasi digitalnya masih rendah.

Berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2024, lebih dari 50% masyarakat di perkotaan telah mulai menggunakan aplikasi ini. Namun, di pedesaan, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi ini termasuk kampanye sosialisasi masif yang melibatkan media sosial, puskesmas, serta tokoh masyarakat. Penggunaan aplikasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti memudahkan mereka mengakses layanan kesehatan, melihat riwayat medis, hingga memperoleh notifikasi tentang program kesehatan preventif. Dengan partisipasi yang tinggi, Satu Sehat dapat berfungsi optimal sebagai platform kesehatan berbasis data.

5. Keamanan dan Privasi Data Kesehatan

Satu faktor penting lainnya dalam implementasi Satu Sehat adalah keamanan dan privasi data kesehatan pengguna. Aplikasi ini mengelola data medis yang sangat sensitif, seperti riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan informasi pribadi lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan aplikasi ini menjadi salah satu pilar keberhasilannya.

Untuk menjamin keamanan data, berbagai rumah sakit dan klinik yang menggunakan aplikasi ini telah mengadopsi standar ISO 27001, yang merupakan standar internasional dalam manajemen keamanan informasi. Standar ini memastikan bahwa data pasien disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu, teknologi enkripsi data juga diterapkan untuk melindungi data selama proses transmisi di jaringan.

Pemerintah dan pengembang aplikasi harus terus memprioritaskan keamanan data serta memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai bagaimana data mereka dikelola. Ini penting agar pengguna merasa nyaman menggunakan aplikasi dan tidak khawatir tentang risiko penyalahgunaan data pribadi mereka.

6. Integrasi dengan Sistem Kesehatan Lain

Keberhasilan aplikasi Satu Sehat juga bergantung pada kemampuannya untuk terintegrasi dengan berbagai sistem kesehatan yang sudah ada di Indonesia. Fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini sudah menggunakan beragam sistem untuk mengelola rekam medis elektronik, BPJS, dan administrasi rumah sakit. Agar aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal, Satu Sehat harus dapat berkomunikasi secara seamless dengan sistem-sistem tersebut.

Salah satu kolaborasi penting yang telah dilakukan adalah dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Dengan integrasi ini, aplikasi Satu Sehat mampu menyediakan data yang lebih lengkap dan terkoordinasi antar-layanan kesehatan, sehingga

memudahkan tenaga medis dalam memberikan perawatan yang tepat kepada pasien. Menurut laporan Kemenkes tahun 2024, integrasi sistem yang efisien ini telah meningkatkan kecepatan pelayanan di rumah sakit dan mempermudah pengelolaan rekam medis pasien. Integrasi ini juga membantu pemerintah dalam melakukan monitoring kesehatan nasional secara lebih akurat dan real-time.

Dengan integrasi yang baik, Satu Sehat dapat menjadi platform yang menghubungkan seluruh ekosistem kesehatan di Indonesia, baik untuk layanan di rumah sakit, puskesmas, maupun pelayanan kesehatan mandiri di rumah.

Keberhasilan implementasi aplikasi Satu Sehat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, pelatihan bagi tenaga kesehatan, partisipasi masyarakat, serta sistem keamanan data yang handal. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu terus mendorong percepatan implementasi, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki kendala infrastruktur dan edukasi.

E. Permasalahan/Tantangan dan Upaya Mengatasi/ Menghadapinya

1. Penurunan Pengguna

Pasca PPKM dicabut sejak 30 Desember 2022, check-in di ruang publik melalui PeduliLindungi tidak lagi diwajibkan. Sertifikat vaksin dan tes COVID-19 juga tidak lagi menjadi syarat wajib bepergian di dalam negeri dan pada sebagian negara lainnya. Dengan kondisi tersebut, ditambah PeduliLindungi yang telah secara resmi bertransformasi menjadi SATUSEHAT Mobile, terjadi penurunan jumlah pengguna aktif harian.

Tercatat setiap bulannya, tersisa lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan yang masih mengakses SATUSEHAT Mobile. Namun, dengan pengguna lebih dari 1 juta, SATUSEHAT Mobile tetap menjadl aplikasi

resmi pemerintah dengan pengguna harian tertinggi untuk sektor kesehatan.

Perubahan penggunaan aplikasi oleh masyarakat dari yang semula bersifat mandatory menjadi user-centric tersebut mendorong Pusdatin-DTO untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fungsi dan fitur kesehatan baru yang berguna dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menghadirkan kemudahan dalam menunjang gaya hidup sehat.

Selain fitur 'Resume Medis', hal tersebut terwujud dengan adanya fitur-fitur kesehatan baru lainnya yang berhasil dirilis dan menarik untuk digunakan masyarakat sehari-hari. Seperti Diari Kesehatan, Pertumbuhan Anak, Pengingat Minum Obat, Cari Obat dan Nakes, Buletin Kesehatan, dan yang terbaru pengguna dapat menghubungkan wearable device seperti jam pintar dengan SATUSEHAT Mobile.

2. Rme Belum Terintegrasi Dengan Satusihat Platform Di Fasyankes

Kondisi dan inisiatif fasyankes di Indonesia untuk memenuhi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) digital yang mumpuni menjadi tantangan tersendiri bagi Pusdatin-DTO, terutama untuk mendukung digitalisasi data RME masyarakat yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Platform. Tentunya, hal tersebut juga berdampak pada masyarakat yang ingin mengakses data resume medis atau fitur-fitur terkait lainnya di SATUSEHAT Mobile.

Untuk menjawab hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, fasyankes diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023.

Kebijakan ini hadir sebagai pembaharuan dari aturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 269 Tahun 2008.

Dengan aturan tersebut, diharapkan seluruh fasyankes dapat siap beradaptasi di tengah misi Kemenkes RI untuk mentransformasikan layanan kesehatan dengan terus meningkatkan kapabilitas dan menjaga integritas layanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih baik melalui digitalisasi.

Di sisi lain, dalam memenuhi kapabilitas dan mendorong penerapan standar teknologi digital yang sama serta pengiriman data kesehatan ke SATUSEHAT Platform, sosialisasi dan pendampingan integrasi juga terus diberikan oleh Pusdatin- DTO untuk fasyankes di berbagai daerah.

Merujuk dari SATUSEHAT Data, hingga 25 April 2024, setidaknya ada 31.643 yang telah terintegrasi dari 60.000 fasyankes yang ditargetkan hingga akhir tahun 2024.

2. INOVASI “LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)”

A. Sejarah Pengembangan

1. 1980-1997

Pemerintahan Orde Baru fokus pada pembangunan infrastruktur (20-25% dari total anggaran pembangunan). Pertumbuhan ekonomi cukup pesat (6-7% per tahun), namun praktik KKN (termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa) mengakibatkan inefisiensi, persaingan usaha tidak sehat dan pemborosan APBN.

2. 1997-1998

Pada saat krisis moneter di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi tajam (mencapai - 13 % pada tahun 1998) dan berkembang menjadi resesi ekonomi. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk meminta bantuan dari International Monetary Fund (IMF).

Persyaratan dalam Letter of Intent IMF:(1) Implementasi Paket Reformasi Ekonomi; (2) Stabilisasi Mata Uang Rupiah; (3) Pemulihan Sistem Perbankan dan (4) Peningkatan kepercayaan investor .

3. 1998-1999

Awal Reformasi di berbagai bidang (ekonomi, politik, hukum, sosial, dan birokrasi). Dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor, Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi dengan menerapkan good governance (AUPB) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah dan memberantas KKN dalam birokrasi publik (termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah).

4. 2000

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah telah memuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, terbuka, adil dan persaingan usaha sehat.

5. 2003

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai implementasi dari Good Governance.

6. 2004

Kajian dan uji coba pelaksanaan sistem E- Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah

7. 2010

Meskipun konsep e-government dalam rangka pelaksanaan e-governance telah diterapkan sejak tahun 2003, namun proses pengadaan secara elektronik (e- procurement) baru dimulai pada tahun 2010. Penerapan sistem E- Procurement sebagai salah satu bentuk realisasi E- Government di bidang pengadaan barang dan jasa.

Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya telah mengatur hal-hal terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) menerbitkan serangkaian Peraturan Kepala LKPP yang merupakan peraturan pelaksanaan terkait E-Procurement, E-

Tendering, E-Purchasing, E- Katalog dst.

Perkembangan sistem e-procurement semakin pesat sejak tahun 2010 sampai saat ini. Berbagai inovasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah terus berkembang. Demikian pula dengan Perka LKPP yang beradaptasi secara dinamis mengikuti perkembangan regulasi dan perkembangan teknologi.

B. Layanan Utama Inovasi LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem yang mendukung proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah. Berikut adalah beberapa fitur utama dari LPSE beserta deskripsi singkatnya:

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan): SIRUP adalah sistem yang berfungsi untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). RUP ini mencakup informasi terkait pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh entitas pemerintah untuk periode tertentu, sehingga publik dan pelaku usaha dapat mengetahui rencana pengadaan secara transparan.

Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik): Aplikasi SPSE adalah sistem yang digunakan dalam proses pengadaan dengan berbagai metode pemilihan, seperti Tender/Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat. Sistem ini mencakup seluruh tahapan pengadaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga kontrak dan serah terima hasil pengadaan. Aplikasi ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan pemerintah.

E-Katalog (Katalog Elektronik): E-Katalog adalah sistem yang menampilkan produk-produk yang disediakan oleh penyedia barang/jasa yang telah terdaftar. Proses pengadaan melalui E-Katalog menggunakan metode pemilihan E-Purchasing, yang memfasilitasi proses pengadaan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan

pemilihan, kontrak, hingga serah terima barang/jasa secara elektronik dan cepat. Sistem ini memudahkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam memilih produk yang sudah terverifikasi dengan harga yang kompetitif.

Toko Daring: Toko Daring adalah sistem yang terintegrasi dengan marketplace umum, yang memungkinkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan untuk langsung membeli barang/jasa dari platform marketplace yang tersedia. Seperti E-Katalog, metode pemilihan dalam Toko Daring juga menggunakan E-Purchasing dengan tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan pemilihan, hingga kontrak dan serah terima barang/jasa secara daring.

SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia): SIKAP adalah aplikasi untuk mengelola data para penyedia barang/jasa yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Aplikasi ini mencatat rekam jejak, kinerja, serta kelengkapan administrasi para penyedia, sehingga proses evaluasi menjadi lebih mudah dan cepat.

INAPROC (Indonesia National Procurement Portal): INAPROC adalah portal pengadaan nasional yang menjadi pintu gerbang utama bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengadaan barang/jasa di seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Portal ini mengintegrasikan berbagai layanan dan sistem pengadaan pemerintah, sehingga menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan nasional.

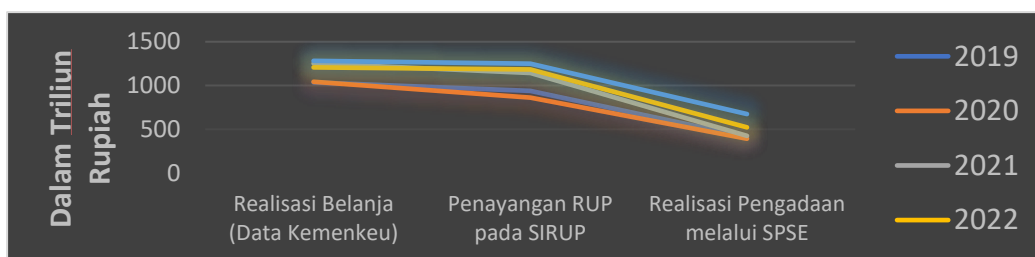
Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

C. Hasil Layanan Inovasi LPSE

Pengembangan Aplikasi LPSE telah memberikan dampak signifikan:

1 Meningkatnya nilai realisasi pengadaan dari tahun ke tahun.

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Belanja (Data Kemenkeu)	1.036 T	1.043 T	1.252 T	1.207 T	1.282 T
Penayangan RUP pada SIRUP	939 T	863 T	1.142 T	1.182 T	1.251 T
Realisasi Pengadaan melalui SPSE	413 T	392 T	425 T	522 T	674 T



2 Peningkatan realisasi metode pemilihan dalam pengadaan

Metode Pemilihan	2022			2023		
	Nilai RUP	Nilai Realisasi	Persentase	Nilai RUP	Nilai Realisasi	Persentase
Tender/ Seleksi/ Tender Cepat	431.6 T	303.8 T	70.4%	426.4 T	371.5 T	87.1%
E-Purchasing	107.7 T	83.6 T	77.6%	238.7 T	189.5 T	79.4%
Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung	201.3 T	104.6 T	52.0%	201.6 T	132.2 T	65.6%

3 Peningkatan nilai pemanfaatan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil menengah.

	2021	2022	2023
Pemanfaatan PDN	74 T	440 T	583 T
Keterlibatan UMK	219 T	504 T	645 T

Perbedaan Pengadaan secara Manual dan Elektronik

Manual	Elektronik/Digital
<p>Secara umum dilakukan secara tatap muka</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses pendaftaran, pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan (aanwijzing), pemasukan penawaran, sanggah dilakukan dengan tatap muka Dengan tatap muka besar berpotensi terjadi persekongkolan 	<p>Mengurangi tatap muka</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses pendaftaran, pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan (aanwijzing), pemasukan penawaran, sanggah secara daring Dengan mengurangi tatap muka, mengurangi potensi persekongkolan
Rawan terjadi persaingan tidak sehat	Persaingan menjadi lebih terbuka
Peluang keterlibatan UMK terbatas	Peluang keterlibatan UMK menjadi lebih terbuka, tercatat lebih dari 400.000 pelaku usaha kecil yang terdaftar dalam SIKAP dan lebih dari 300.000 yang terdaftar dalam Toko Daring
Proses pengadaan mengikuti hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan dapat lebih cepat karena sebagian besar tahapan dapat dilakukan kapanpun dalam sistem secara daring Terdapat beberapa metode pemilihan yang cukup cepat seperti E-Purchasing dengan rata-rata proses pemilihan 6 hari dan paling cepat 1 hari. Selain itu dengan metode pemilihan Tender Cepat dengan rata-rata proses 3-6 hari dan paling cepat 2 hari
<ul style="list-style-type: none"> Kurang transparan Kurang akuntabel Sulit untuk melakukan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih transparan dan akuntabel karena seluruh proses tercatat dalam sistem Lebih mudah untuk melakukan monitoring dan audit karena data pengadaan terekam dalam sistem Masyarakat dapat ikut melakukan monitoring karena informasi umum pengadaan dapat diakses publik melalui sistem
Terdapat biaya operasional seperti cetak dokumen, perjalanan untuk proses tatap muka, logistik, dan lain sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi biaya operasional tatap muka, cetak dokumen dan lain sebagainya Kemudahan akses ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah akan meningkatkan kompetisi sehingga mendorong penyedia untuk memberikan penawaran dengan harga terbaik dan mencapai efisiensi biaya

D. Dampak Layanan Inovasi LPSE

1. Easier

Proses pengadaan menjadi lebih mudah, dimana para pengguna dalam melakukan proses pengadaan cukup dari lokasi masing-masing, tanpa harus mendatangi lokasi tertentu pada saat proses pengadaan seperti pendaftaran, penyampaian penawaran, dsb.

Pengguna dalam memahami tata cara penggunaan Aplikasi semakin mudah karena tersedia berbagai macam tutorial baik dalam bentuk Panduan Pengguna maupun Video Tutorial melalui beberapa kanal digital. Termasuk adanya unit/fungsi pengelola LPSE di setiap K/L/PD yang siap memberikan informasi maupun bimbingan teknis penggunaan Aplikasi.

Kemudahan akses bagi UMK untuk masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah seperti simplifikasi persyaratan pembuatan akun, penayangan produk pada katalog elektronik dan transaksi melalui toko daring.

Penanganan permasalahan disediakan melalui berbagai kanal agar mudah diakses oleh pengguna. Kanal yang tersedia diantaranya melalui e-ticketing melalui LPSE Support, telepon melalui call center 144, chat melalui Whatsapp dan juga konsultasi tatap muka ke kantor LKPP.

2. Faster

Proses pengadaan menjadi lebih cepat dengan mengurangi tatap muka. Selain itu sebagian besar proses pengadaan dapat dilakukan/diakses secara daring dalam 24 jam setiap harinya.

Dengan beberapa metode pemilihan seperti Tender Cepat dan E-Purchasing baik melalui Katalog Elektronik maupun Toko Daring, proses pengadaan menjadi lebih simpel dan cepat.

3. Better

Data pengadaan tersimpan secara digital (akuntabel), yang dapat dimanfaatkan untuk analisis dan perencanaan pengadaan di masa mendatang. Sehingga pelaku pengadaan dapat mengambil keputusan berbasis data.

Data penilaian kinerja dari pengadaan di seluruh Indonesia dapat diakses oleh pelaku pengadaan dan menjadi pertimbangan dalam pengadaan selanjutnya.

Masyarakat dapat ikut mengawasi proses pengadaan yang berjalan melalui sistem sehingga lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan pemerintah.

Data pengadaan dapat dimonitoring dan evaluasi dalam skala nasional untuk mengukur target-target pemerintah misalnya pemberdayaan UMK, penggunaan PDN, dan transaksi e-purchasing.

4. Cheaper

Mengurangi biaya administrasi dan operasional. Semua proses administrasi dilakukan secara digital, sehingga dapat menghemat biaya terkait pengelolaan dokumen. Selain itu, biaya yang biasanya digunakan untuk pertemuan tatap muka, perjalanan, atau logistik pengadaan juga berkurang.

Kemudahan akses ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah akan meningkatkan kompetisi sehingga mendorong penyedia untuk memberikan penawaran dengan harga terbaik dan mencapai efisiensi biaya.

E. Faktor Keberhasilan Implementasi LPSE

Keberhasilan inovasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) didukung oleh beberapa faktor kunci yang memungkinkan sistem ini memberikan dampak yang positif pada proses pengadaan barang/jasa di Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor utama yang berkontribusi pada kesuksesan inovasi LPSE:

1. Transparansi Proses Pengadaan

LPSE menyediakan akses terbuka kepada publik untuk memantau seluruh tahapan pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga penentuan pemenang. Keterbukaan ini menciptakan kepercayaan di antara penyedia barang/jasa serta publik terhadap integritas dan keadilan proses pengadaan. Informasi yang dipublikasikan secara real-time membuat pengadaan lebih akuntabel dan minim manipulasi.

2. Efisiensi Waktu dan Biaya

Penggunaan teknologi e-procurement melalui LPSE mempercepat tahapan-tahapan pengadaan yang sebelumnya memerlukan waktu lama, seperti evaluasi dokumen dan proses tender. Sistem ini juga memangkas biaya operasional, seperti penghematan pada penggunaan kertas, perjalanan, dan biaya administrasi. Dengan demikian, LPSE menciptakan pengadaan yang lebih cepat dan hemat biaya, yang memberikan keuntungan langsung pada pemerintah dan masyarakat.

3. Peningkatan Partisipasi Penyedia Barang/Jasa

LPSE memungkinkan lebih banyak penyedia barang/jasa, baik lokal maupun nasional, untuk ikut serta dalam proses pengadaan. Dengan sistem yang mudah diakses dan transparan, LPSE mendorong persaingan sehat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas barang/jasa yang diadakan. Banyaknya peserta lelang juga memberikan pilihan yang lebih luas dan penawaran yang lebih kompetitif bagi pemerintah.

4. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Dengan sistem pengadaan yang terekam secara elektronik dan dapat diaudit, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa dapat ditekan. Semua langkah proses dapat dipantau oleh pihak berwenang dan diaudit secara

independen, sehingga memperkecil peluang manipulasi dan penyimpangan yang biasanya terjadi pada pengadaan konvensional.

5. Penggunaan Standar Internasional

LPSE menerapkan standar internasional, seperti ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 27001:2013 untuk manajemen keamanan informasi. Penerapan standar ini memastikan bahwa proses pengadaan melalui LPSE dilakukan dengan kualitas yang terjamin, dan data sensitif terjaga keamanannya. Selain itu, LPSE mengadopsi prinsip-prinsip dari hukum model UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) untuk menciptakan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

6. Infrastruktur Teknologi yang Mendukung

Infrastruktur digital yang kuat menjadi faktor penting dalam keberhasilan LPSE. Akses internet yang baik serta sistem informasi yang andal memungkinkan pengadaan dilakukan secara elektronik tanpa hambatan teknis yang berarti. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, LPSE dapat menjangkau lebih banyak wilayah, meskipun beberapa daerah masih menghadapi tantangan akses internet yang terbatas.

7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penerapan sistem digital seperti LPSE memerlukan peningkatan kapasitas baik dari sisi penyedia barang/jasa maupun aparatur pemerintah. Pelatihan rutin yang diberikan kepada pengguna LPSE memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk menjalankan proses pengadaan secara elektronik. Kemampuan untuk mengoperasikan sistem e-procurement yang efisien sangat mendukung kelancaran implementasi LPSE.

8. Komitmen dari Pemerintah dan Kebijakan yang Mendukung

Dukungan kuat dari pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan pengawasan adalah faktor penting dalam keberhasilan LPSE. Kebijakan yang mengharuskan pengadaan dilakukan melalui LPSE serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaannya membantu memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara konsisten dan merata di seluruh Indonesia.

Keberhasilan LPSE adalah hasil dari sinergi antara teknologi, kebijakan, sumber daya manusia, serta komitmen untuk menciptakan pengadaan yang bersih, transparan, dan efisien.

F. Permasalahan dan Tantangan LPSE serta Upaya untuk Mengatasi

Upaya untuk mewujudkan LPSE yang berkualitas tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan, berikut diantaranya:

1. Kesenjangan Infrastruktur Teknologi

Di Indonesia, akses internet berkualitas tinggi dan kepemilikan perangkat keras yang memadai masih terpusat di wilayah perkotaan dan daerah yang lebih maju. Sementara itu, wilayah pedesaan dan terpencil sering kali mengalami keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini membuat penerapan e-procurement di wilayah tersebut menjadi kurang optimal dan membatasi partisipasi penyedia barang/jasa yang berada di luar daerah perkotaan.

2. Adaptasi Pengguna

Disaat pengembangan platform e-procurement mengikuti teknologi terkini, adaptasi pengguna terhadap teknologi digital masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah. Terdapat pegawai pemerintah dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan kemampuan menggunakan teknologi.

3. Keamanan Data

Tantangan keamanan data menjadi isu krusial sebagai resiko dari komitmen melaksanakan pengadaan secara digital. Misalnya perlindungan data sensitif, serangan siber, keamanan identitas dan autentikasi, keamanan data transfer, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan data.

4. Kepatuhan Pemanfaatan Sistem

Tingkat kepatuhan pemanfaatan sistem khususnya untuk metode pengadaan langsung masih belum maksimal.

Berikut adalah upaya dalam mengatasi beberapa permasalahan diatas.

1. Membangun platform e-procurement yang mudah digunakan, responsif dan kompatibel diakses dari berbagai jenis perangkat keras.
2. Menyediakan layanan informasi seperti video tutorial dan petunjuk penggunaan aplikasi serta melakukan kampanye melalui media sosial.
3. Upaya terhadap tantangan keamanan data:
 - Menerapkan enkripsi data dan protokol keamanan tingkat lanjut
 - Menerapkan autentikasi multi-faktor (MFA)
 - Membangun kesadaran keamanan kepada pengguna melalui sosialisasi dan kampanye media sosial
 - Bekerjasama dengan pihak terkait keamanan siber dan jaringan seperti BSSN, dan lain sebagainya
4. Mendorong penggunaan sistem pengadaan melalui kebijakan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang menjadi bagian penilaian Reformasi Birokrasi. Selain itu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis. Serta inisiasi integrasi dengan berbagai sistem yang dikelola oleh instansi lain agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

BAB III

INSTRUMEN

PENGUKURAN DAMPAK

INOVASI (Level Mikro)

A. Pengantar

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas implementasi inovasi daerah, penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi di tingkat mikro menjadi langkah strategis yang sangat penting. Instrumen ini dirancang untuk menyediakan alat bantu yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi, menilai, dan mengukur dampak langsung dari inovasi terhadap capaian kinerja kegiatan. Dengan pendekatan PDI, pemerintah daerah dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) inovator dapat memahami sejauh mana inovasi yang diinisiasi memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya

1. Peningkatan Kapasitas Evaluasi Mandiri (*Self-Assessment*). Instrumen ini akan membantu koordinator inovasi daerah dan OPD inovator untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap inovasi yang telah diimplementasikan. Penilaian mandiri ini mencakup pengukuran dampak langsung (*immediate impact*) yang dihasilkan terhadap indikator kinerja spesifik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses evaluasi menjadi lebih efisien dan berbasis data yang akurat.
2. Mendukung Pengembangan Format Pendampingan Inovasi Instrumen ini juga dirancang untuk mendukung Lembaga

Administrasi Negara (LAN) dalam mengembangkan format pendampingan bagi pengembangan inovasi daerah. Dengan alat yang terstandardisasi, LAN dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi inovasi yang lebih terarah, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penerapan instrumen ini diharapkan membawa manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah: Mempermudah penilaian dampak inovasi secara mandiri sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan potensi pengembangan inovasi dengan lebih cepat.
2. Bagi Lembaga Administrasi Negara: Membantu LAN dalam menyusun strategi pendampingan berbasis bukti untuk meningkatkan kapasitas inovasi daerah. Format ini dapat menjadi model yang aplikatif dalam pengembangan inovasi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Bagi Masyarakat: Pada akhirnya, masyarakat sebagai penerima manfaat utama akan merasakan dampak positif dari inovasi yang terukur dan terarah, baik dalam bentuk peningkatan layanan publik, efisiensi birokrasi, maupun penguatan pembangunan sosial-ekonomi lokal.

B. Urgensi Pengukuran Dampak Inovasi (level Mikro)

Pendekatan pada level mikro memastikan bahwa fokus evaluasi tidak hanya tertuju pada dampak jangka panjang, tetapi juga pada capaian-capaian langsung yang sering kali menjadi indikator awal keberhasilan suatu inovasi. Hal ini memungkinkan inovator untuk segera melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga inovasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas ke depannya. Melalui penyusunan instrumen pengukuran dampak inovasi

yang terstandar dan aplikatif, pemerintah daerah dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, LAN, dan stakeholder lainnya, Indonesia dapat mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi di tingkat daerah menunjukkan perkembangan yang signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2023, tercatat sebanyak 2.269 proposal inovasi pelayanan publik telah didaftarkan dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), sebagaimana dirilis oleh Kemenpan RB. Selain itu, laporan dari Kemendagri mencatat bahwa pada tahun yang sama terdapat 26.539 inovasi daerah yang terdaftar dalam kerangka Inovasi Government Award (IGA). Angka-angka tersebut mencerminkan antusiasme yang tinggi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah Sejauh mana inovasi-inovasi ini memberikan dampak terhadap kinerja kegiatan dan layanan publik? Bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan kinerja OPD secara keseluruhan dan efisiensi tata kelola pemerintah daerah?

Kebutuhan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi akan terkait dengan paling tidak 2 (dua) instrumen evaluasi, yaitu Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri – Kementerian Dalam Negeri (BSKDN kemendagri) dan instrumen penilaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan dan RB.

Pertama, apabila dikaitkan dengan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID) dari BSKDN - Kemendagri, maka kebutuhan perlunya instrumen pengukuran dampak inovasi, tercermin pada komponen penilaian sebagai berikut.

1. Komponen Substansi Inovasi

Substansi inovasi mencakup aspek tujuan, manfaat, dan hasil dari inovasi daerah. Variabel ini menitikberatkan pada pemahaman naratif mengenai:

- Tujuan Inovasi Daerah: Menggambarkan visi dan misi inovasi yang dilakukan, baik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas layanan publik, atau menjawab permasalahan tertentu.
- Manfaat yang Diperoleh: Penjelasan mengenai dampak positif inovasi terhadap stakeholder terkait, seperti masyarakat, OPD, atau unit kerja lainnya.
- Hasil Inovasi: Menguraikan pencapaian konkret yang telah diraih, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- Bentuk pengisian pada variabel ini disajikan dalam teks atau narasi yang dapat dilengkapi dengan keterangan tambahan, seperti deskripsi pelaksanaan dan bukti pendukung (laporan, dokumen, atau data survei).

2. Komponen Kemanfaatan Inovasi

Variabel ini berfokus pada pengukuran manfaat inovasi menggunakan beberapa satuan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing inovasi, antara lain:

- Satuan Orang: Meliputi jumlah individu yang terpengaruh secara langsung oleh inovasi, seperti pegawai, peserta didik, pasien, atau masyarakat umum.
- Satuan Unit: Mengukur cakupan unit kerja, seperti jumlah OPD, UPTD, desa/kampung, atau organisasi lain yang terlibat atau menerima dampak inovasi.
- Satuan Biaya: Menilai efisiensi atau penghematan biaya yang dihasilkan oleh implementasi inovasi.

- Satuan Pendapatan: Mengidentifikasi peningkatan pendapatan daerah atau unit kerja yang dihasilkan melalui inovasi tersebut.
- Satuan Hasil Produk/Penjualan: Mengukur jumlah produk atau layanan yang berhasil dihasilkan atau dijual sebagai dampak dari inovasi.

Kebutuhan Pengukuran Dampak Inovasi pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri

Dalam pengisian Aplikasi Indeks Inovasi Daerah - Kemendagri

33. KEMANFAATAN INOVASI*

BOBOT 3

Satuan	Data Pendukung	★	★★	★★★
a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/pegiang	Cakupan penerima manfaat 1-100 orang	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih
b. Satuan unit (opdu/pid/daerah/kampung/KK/organisasi, dsb)	b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran
c. Satuan biaya (rupiah)	c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%
d. Satuan pendapatan (rupiah)	d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan tahun terakhir dan tahun sebelumnya (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb) <i>Contoh:</i> Inovasi di terapkan sejak tahun 2022 sampai saat ini masih diterapkan maka peningkatan diukur dari pendapatan tahun 2023 dibanding 2022	Penambahan pendapatan bagi penda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01% - 9,99%	Penambahan pendapatan bagi penda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	Penambahan pendapatan bagi penda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥20%
e. Satuan hasil produk/satuan penjualan	e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang

No	Substansi	Jenis Pengisian	Keterangan
13.	Tujuan inovasi daerah	Teks/naratif	Isikan informasi yang mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah
14.	Manfaat yang diperoleh	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai dampak (outcomes) terhadap penerapan Inovasi Daerah
15.	Hasil inovasi	Teks/naratif	Isikan informasi mengenai produk/hasil (output) penyelenggaraan Inovasi

Penilaian kemanfaatan inovasi dilakukan berdasarkan data pendukung, seperti laporan resmi, dokumen hasil implementasi, atau bukti valid lainnya. Data ini memberikan dasar yang objektif untuk menilai sejauh mana inovasi telah berhasil diimplementasikan. Sistem penilaian menggunakan skala bintang sebagai indikator cakupan keberhasilan inovasi. Semakin tinggi jumlah cakupan yang telah dicapai (contohnya jumlah orang yang terlibat atau unit yang terdampak), semakin tinggi pula bintang penilaian yang diperoleh. Sistem ini

dirancang untuk memberikan gambaran visual dan mudah dipahami mengenai dampak dan manfaat inovasi tersebut

Kedua, apabila dikaitkan dengan instrumen proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB, maka kebutuhan perlunya instrumen pengukuran dampak inovasi, tercermin pada komponen penilaian sebagai berikut.

Kebutuhan Pengukuran Dampak Inovasi pada Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB

Dalam pengisian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik – Kemenpan RB	<table><tr><td data-bbox="699 768 871 994">Signifikansi (25%)</td><td data-bbox="871 768 1259 994">Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) Maksimal 600 kata.</td></tr><tr><td data-bbox="699 994 871 1261">Kontribusi terhadap capaian TPB (5%)</td><td data-bbox="871 994 1259 1261">Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kabupaten. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata *untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman: (http://sdqs.bappenas.go.id/)</td></tr></table>	Signifikansi (25%)	Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) Maksimal 600 kata.	Kontribusi terhadap capaian TPB (5%)	Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kabupaten. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata *untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman: (http://sdqs.bappenas.go.id/)
Signifikansi (25%)	Uraikan secara singkat bagaimana inovasi ini diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan penilaian/asesmen yang dilakukan untuk mengukur dampak/ keberhasilan inovasi (dengan mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan) Maksimal 600 kata.				
Kontribusi terhadap capaian TPB (5%)	Jelaskan kontribusi nyata yang dapat diukur dari inovasi terhadap capaian TPB pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kabupaten. Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang relevan. Maksimal 200 kata *untuk informasi TPB lebih lanjut dapat mengakses laman: (http://sdqs.bappenas.go.id/)				

Pengukuran dampak inovasi dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB menjadi elemen kunci dalam menilai keberhasilan dan relevansi program-program inovasi yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian ini didasarkan pada beberapa variabel penting yang mencerminkan kontribusi inovasi terhadap penyelesaian masalah dan capaian pembangunan berkelanjutan.

1. Variabel Signifikansi (Bobot 25%)

Variabel ini berfokus pada pentingnya inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam uraian proposal, OPD diharuskan menjelaskan secara ringkas tetapi komprehensif mengenai Identifikasi

Masalah dan Implementasi Solusi, Bagaimana inovasi ini diterapkan untuk menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi? Penjelasan harus mencakup langkah-langkah implementasi yang dilakukan serta pihak-pihak yang terlibat. Kemudian Penilaian/Asesmen Dampak, OPD diminta untuk mendeskripsikan dampak nyata dari inovasi tersebut dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi. Misalnya, penurunan jumlah antrian pasien di rumah sakit, peningkatan tingkat kepuasan layanan publik, atau efisiensi anggaran yang dicapai. Indikator Keberhasilan bisa berupa Data dan informasi berbasis fakta menjadi alat ukur yang penting untuk menggambarkan signifikansi dampak inovasi. Hal ini dapat berupa angka kuantitatif (seperti persentase perubahan) maupun deskripsi kualitatif (seperti testimoni atau evaluasi pihak terkait).

2. Variabel Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Bobot 5%)

Selain signifikansi, inovasi juga dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Variabel ini memiliki bobot sebesar 5% dan menjadi ukuran penting untuk memastikan inovasi memiliki dampak nyata dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kontribusi Nyata dan Terukur, Inovator diminta untuk menjelaskan secara detail bagaimana inovasi tersebut mendukung satu atau lebih tujuan TPB yang relevan. Misalnya, kontribusi terhadap TPB 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) melalui peningkatan akses layanan kesehatan, atau TPB 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) melalui pengelolaan sampah berbasis teknologi. Penilaian difokuskan pada dampak nyata yang dapat diukur, seperti jumlah orang yang mendapatkan manfaat, pengurangan emisi karbon, atau peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Penjelasan juga harus

menyertakan bagaimana inovasi tersebut memberikan dampak langsung pada kementerian, lembaga, atau pemerintah kabupaten yang terlibat.

C. Bentuk Inovasi Berdasarkan PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengatur tentang bentuk-bentuk inovasi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk-bentuk inovasi ini mencakup tiga kategori utama, yaitu: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Lainnya.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Inovasi tata kelola pemerintahan berfokus pada pengembangan sistem, metode, atau prosedur yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Contoh inovasi dalam kategori ini meliputi penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital untuk administrasi pemerintahan, perbaikan proses penganggaran daerah yang lebih partisipatif, atau pengembangan mekanisme koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

2. Inovasi Pelayanan Publik

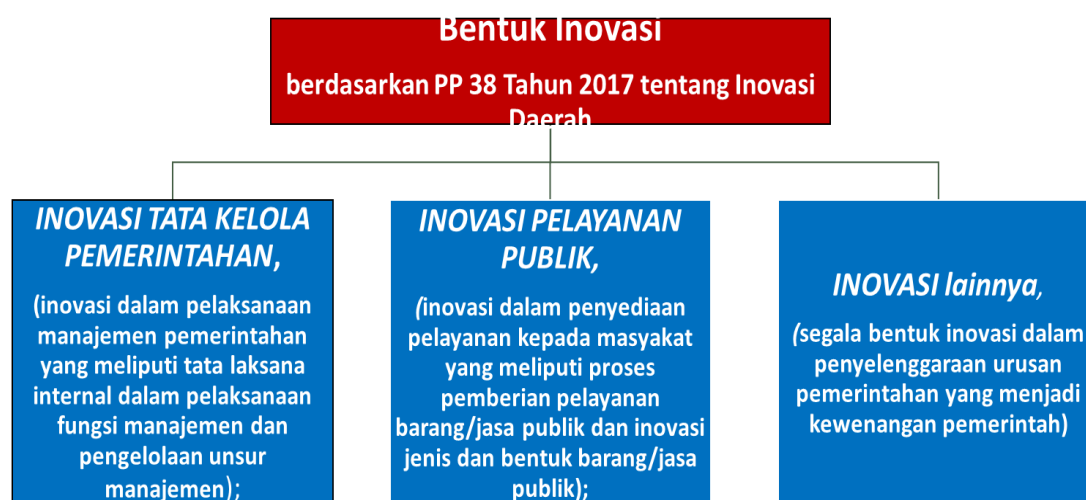
Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang inovatif mencakup pengembangan teknologi dalam layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan administrasi kependudukan. Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah telah mengembangkan aplikasi layanan terpadu untuk pembuatan dokumen administrasi, sistem antrean digital di rumah sakit, atau pelayanan keliling untuk masyarakat di daerah terpencil. Inovasi pelayanan publik

diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

3. Inovasi Lainnya dalam Lingkup Urusan Pemerintahan

Kategori ini mencakup inovasi-inovasi yang masih berada dalam lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan pemerintah daerah. Inovasi lainnya bersifat lintas sektor atau tematik, seperti inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, penanganan bencana, atau pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Contohnya adalah pengelolaan kawasan wisata berbasis ekonomi kreatif, pengembangan bank sampah sebagai bagian dari pengelolaan limbah daerah, atau sistem mitigasi bencana berbasis teknologi.

Bentuk-Bentuk Inovasi Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah



D. Dampak Ultimate yang Diharapkan dari Inovasi Daerah

Terdapat 2 (dua) pendekatan mengenai dampak akhir dari inovasi daerah, yaitu berdasarkan pendekatan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan berberdasarkan pendekatan tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mencakup berbagai dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 6, terdapat tujuh dampak utama inovasi daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik. Inovasi dirancang untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan teknologi dan penyederhanaan prosedur administrasi.
2. Meningkatnya Keberdayaan atau Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan inovasi, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat. Inovasi daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemerintah, menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga.
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan aset daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi potensi lokal, efisiensi sistem retribusi, atau pengembangan sektor-sektor unggulan.
5. Menghematnya Belanja Daerah. Dengan penerapan inovasi, pemerintah dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi anggaran, misalnya melalui digitalisasi proses atau penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
6. Meningkatnya Capaian Kinerja Daerah. Inovasi memungkinkan pemerintah daerah mencapai target-target pembangunan yang telah

ditetapkan, baik dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) maupun dalam indikator-indikator nasional.

7. Meningkatnya Daya Saing Daerah. Dengan inovasi, daerah dapat menarik lebih banyak investasi, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), dan memperkuat citra daerah sebagai kawasan yang progresif dan adaptif terhadap perubahan global.

Setiap dampak tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintahan

Target Dampak Inovasi Secara Makro pada PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah



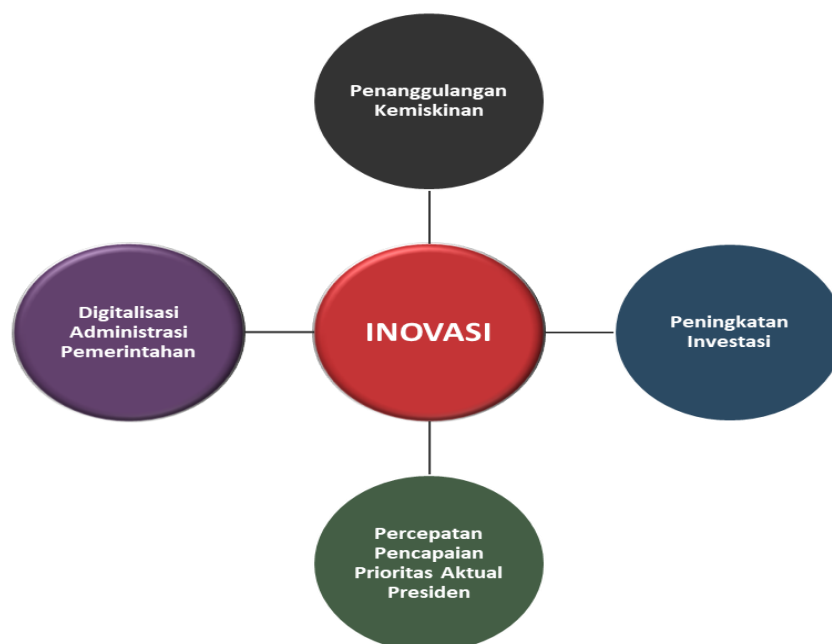
Sedangkan berdasarkan lingkup dampak inovasi sesuai dengan prioritas reformasi birokrasi, terdapat empat klaster utama yang menjadi fokus pemerintah untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pertama, penanggulangan kemiskinan, bertujuan untuk memastikan inovasi yang diimplementasikan dapat mengatasi permasalahan sosial-ekonomi, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, serta memberdayakan kelompok rentan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Kedua, digitalisasi administrasi negara, yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di berbagai sektor.

Ketiga, peningkatan investasi, yang mendorong inovasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, seperti penyederhanaan proses perizinan, transparansi regulasi, dan optimalisasi promosi potensi investasi lokal. Klaster ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun asing, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Target Dampak Inovasi Secara Makro pada Kebijakan Reformasi Birokrasi yang Berdampak



Keempat, percepatan pencapaian prioritas aktual presiden, yang berfokus pada inovasi strategis untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ketahanan ekonomi. Keempat klaster ini menjadi pilar penting yang mendorong inovasi daerah yang selaras dengan visi reformasi birokrasi, menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Kerangka Pikir Pengembangan Instrumen Pengukuran

Dampak Inovasi Daerah

Terdapat 3 (tiga) kerangka pikir yang mendasari pengembangan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi pada Tahun 2018 ini, yaitu:

1. Keterkaitan Dokumen RPJMD, Renja/RKA dengan Inovasi
2. Model Logis Penjenjangan Kinerja Kegiatan
3. Posisi Inovasi dalam Pelaksanaan Visi-Misi, Program dan Kegiatan

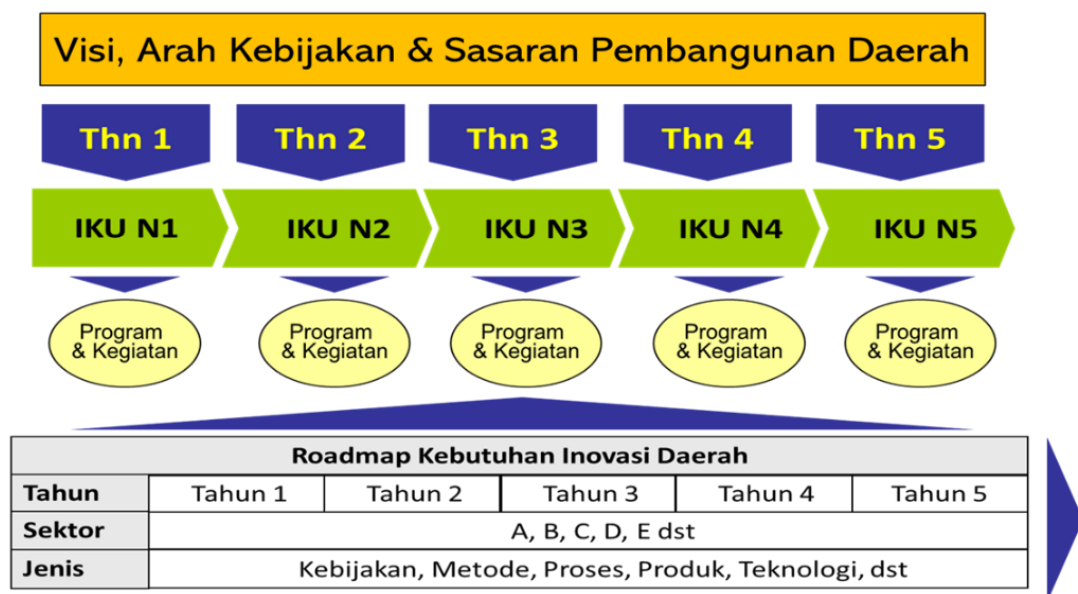
Kerangka Pikir 1: Keterkaitan Dokumen RPJMD, Renja/RKA dengan Inovasi

Kerangka pikir mengenai alur keterkaitan dokumen RPJMD, Renja/RKA dengan inovasi menjelaskan pentingnya inovasi sebagai strategi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Inovasi tidak hanya sekadar menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi sebuah pendekatan atau cara yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dalam hal ini, inovasi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah urusan tersendiri, tetapi hadir dalam setiap urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pembangunan lainnya.

Untuk memastikan inovasi benar-benar memberikan dampak positif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami secara

mendalam visi, misi, serta arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya, sasaran tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah. Inovasi yang diusulkan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut serta berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program lainnya. Dengan cara ini, inovasi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka Pikir 1: Keterkaitan Dokumen RPJMD, Renja/RKA dengan Inovasi



Sebagai gambaran, diagram RPJMD menunjukkan hubungan yang erat antara visi daerah, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan. Visi ini menjadi pemandu utama, sedangkan arah kebijakan memberikan fokus strategis yang perlu dijalankan. Sasaran pembangunan, yang dirinci berdasarkan tahun pelaksanaan, memberikan tolak ukur yang lebih spesifik untuk memastikan pencapaian visi tersebut. Di bawah kerangka RPJMD ini, indikator kinerja utama (IKU) menjadi panduan

dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan. Setiap program dan kegiatan memiliki peran masing-masing untuk mendukung sasaran pembangunan, yang kemudian diperkuat melalui inovasi daerah. Selain itu, untuk mengarahkan inovasi secara terencana, sebuah roadmap kebutuhan inovasi daerah disusun berdasarkan sektor prioritas dan jenis inovasi yang dibutuhkan. Roadmap ini mencakup data input berupa tahun pelaksanaan, sektor yang menjadi fokus (misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau tata kelola), serta jenis inovasi (misalnya digitalisasi, pemberdayaan masyarakat, atau sistem baru).

Contohnya:

- Tahun: 2024
- Sektor: Pendidikan
- Jenis Inovasi: Digitalisasi administrasi sekolah

Dengan roadmap ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Keseluruhan kerangka pikir menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya sebuah proyek tambahan, tetapi sebuah strategi utama dalam mempercepat pembangunan daerah yang terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kerangka Pikir 2: Model Logis Penjenjangan Kinerja Kegiatan

Kerangka pikir model logis penjenjangan kinerja kegiatan, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, memberikan panduan sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Kerangka ini membagi kinerja menjadi tiga klaster utama, yaitu mikro, meso, dan makro, dengan pendekatan yang berjenjang dari input hingga outcome akhir. Berikut penjelasannya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

1. Klaster Mikro: Fokus pada Tingkat Operasional

Di klaster ini, perhatian utama adalah pada kegiatan langsung yang dilakukan instansi pemerintah. Dimulai dari:

- Input: Sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, tenaga kerja, dan alat.
- Proses: Aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan layanan atau produk, misalnya pelaksanaan pelatihan atau pembangunan fasilitas.
- Output: Hasil langsung dari proses, seperti jumlah orang yang dilatih, fasilitas yang selesai dibangun, atau dokumen yang diterbitkan.
- Immediate Outcome (Outcome Tingkat 1): Dampak awal dari output yang dihasilkan, misalnya peningkatan pengetahuan peserta pelatihan atau mulai digunakannya fasilitas yang dibangun.

2. Klaster Messo: Fokus pada Outcome Tingkat Menengah

Pada klaster ini, perhatian bergeser ke pengaruh jangka menengah yang dicapai oleh program atau kebijakan. Ini mencakup:

- Intermediate Outcome (Outcome Tingkat 2): Dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan immediate outcome.

Misalnya, jika di klaster mikro output-nya adalah pelatihan guru dan immediate outcome-nya adalah peningkatan keterampilan guru, maka intermediate outcome di klaster meso bisa berupa meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah yang dihasilkan dari keterampilan guru yang lebih baik.

3. Klaster Makro: Fokus pada Outcome Akhir (Final Outcome)

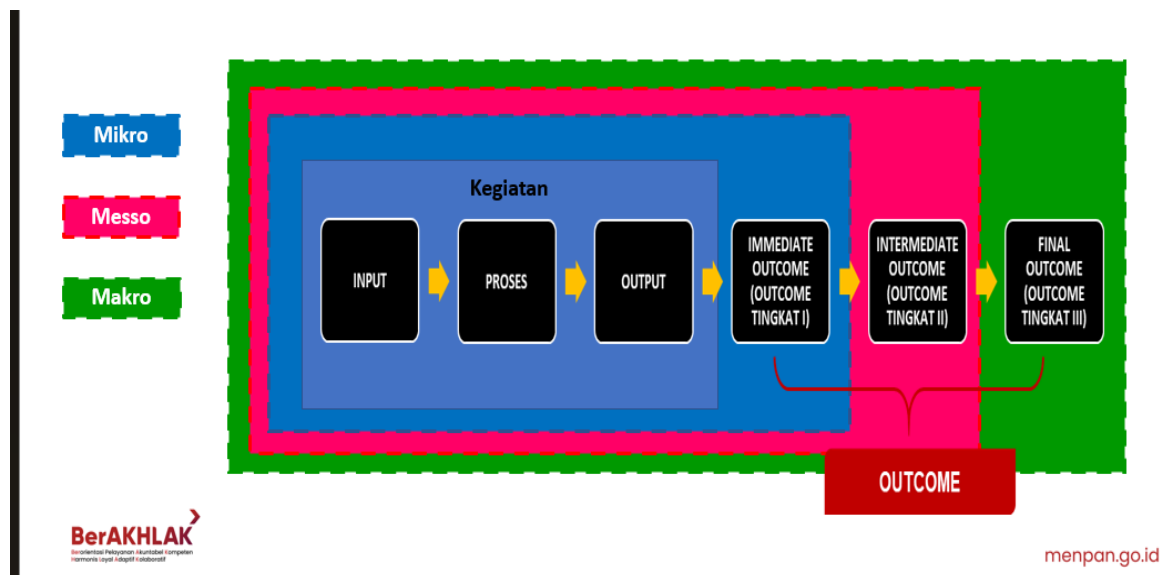
Klaster terakhir, makro, melihat dampak akhir atau tujuan strategis dari suatu kebijakan atau program, yaitu:

- Final Outcome (Outcome Tingkat 3): Dampak jangka panjang yang diharapkan tercapai dalam skala nasional atau regional.

Misalnya, dalam kasus pelatihan guru tadi, final outcome di level makro bisa berupa meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena pendidikan yang lebih baik secara keseluruhan.

Klaster makro mengukur sejauh mana program-program pemerintah berkontribusi pada visi dan misi besar pembangunan nasional atau daerah.

Kerangka Pikir 2: Model Logis Penjenjangan Kinerja Kegiatan



Model logis ini menunjukkan bagaimana input dan proses di klaster mikro memberikan kontribusi langsung pada intermediate outcome di klaster messo, yang pada akhirnya mendukung pencapaian final outcome di klaster makro. Dengan kata lain, keberhasilan di level mikro menjadi fondasi bagi pencapaian di level messo dan makro.

Kerangka Pikir 3: Posisi Inovasi dalam Pelaksanaan Visi-Misi, Program dan Kegiatan

1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan (Dampak Makro)

Pada kotak pertama, kita mulai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi pembangunan daerah, yang menghasilkan dampak makro dari seluruh sistem perencanaan dan kebijakan daerah. Visi dan Misi menggambarkan tujuan jangka panjang dan cara pencapaiannya, sementara Tujuan dan Sasaran adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai. Strategi dan Arah Kebijakan adalah langkah-langkah besar yang akan diambil untuk mencapainya. Dampak makro ini mencakup perubahan besar yang diharapkan terjadi dalam pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau perbaikan kualitas pemerintahan. Inovasi disini berfungsi sebagai cara atau terobosan yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi, melalui pendekatan baru dalam kebijakan atau strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan.

2) Program (Dampak Messo)

Kotak kedua adalah Program, yang berada pada tingkat dampak messo. Di sini, kebijakan yang lebih besar diterjemahkan menjadi program-program spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih terperinci. Program ini memiliki dampak yang langsung berhubungan dengan kelompok masyarakat atau sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Inovasi yang dilakukan di tingkat program ini dapat meliputi model pelayanan baru atau pendekatan yang lebih efisien dalam menjalankan program-program tersebut. Inovasi di sini harus mendukung pelaksanaan program dengan cara-cara baru yang lebih efektif, seperti penerapan teknologi, sistem manajemen baru, atau metode penyelesaian masalah yang lebih efisien.

3) Kegiatan/Sub-Kegiatan (Dampak Mikro)

Pada kotak ketiga, kita masuk ke dalam Kegiatan/Sub-Kegiatan, yang berfokus pada dampak mikro. Kegiatan ini adalah langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat atau unit kerja tertentu. Kegiatan/Sub-Kegiatan ini adalah tugas yang lebih spesifik dan merupakan bagian dari implementasi program-program yang telah disusun. Di tingkat ini, inovasi berperan sebagai cara atau terobosan dalam menjalankan kegiatan/sub-kegiatan. Inovasi di tingkat mikro ini dapat berupa cara baru dalam melaksanakan tugas sehari-hari, seperti proses yang lebih terstandarisasi, penggunaan teknologi baru, atau pendekatan yang lebih berbasis pada hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

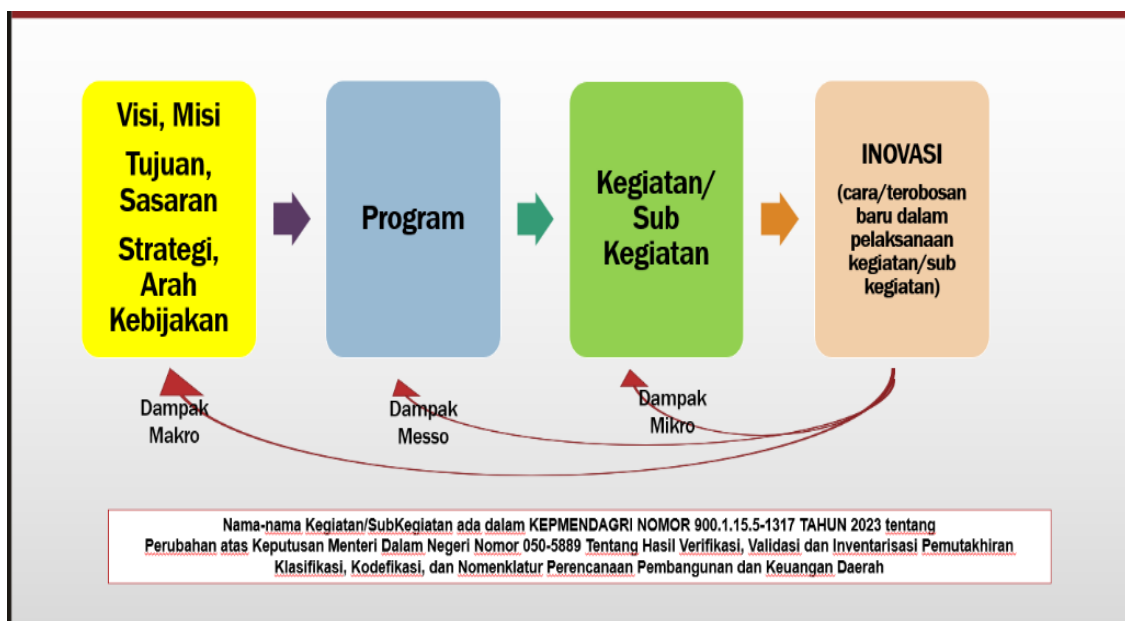
Nama-nama Kegiatan/Sub-Kegiatan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tercatat dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yang berisi tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen ini memberikan struktur yang jelas tentang kegiatan dan sub-kegiatan yang dapat diimplementasikan, serta standar yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan setiap kegiatan/sub-kegiatan dalam pembangunan daerah. Dengan mengikuti pedoman yang terdapat dalam KEPMENDAGRI ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kegiatan. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada, sehingga proses perencanaan dan implementasi dapat dilakukan dengan baik.

4) Inovasi sebagai Penunjuk Terobosan Baru dalam Pelaksanaan Kegiatan

Di pusat diagram, terdapat Inovasi, yang merupakan penunjuk atau katalisator yang menghubungkan dan menggerakkan ketiga dampak tersebut: makro, meso, dan mikro. Inovasi di sini menjadi cara terobosan

baru dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan kebijakan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Inovasi yang digunakan dalam kegiatan ini membantu meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki manajemen anggaran, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Kerangka Pikir 3: Hubungan Inovasi dengan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan



F. Level Pengukuran Dampak Inovasi dan Perbandingan Antar Level

Inovasi yang diterapkan dalam pemerintahan daerah memiliki tiga level dampak utama, yang berhubungan langsung dengan kinerja kegiatan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Setiap level dampak ini memiliki tingkatan pengaruh yang berbeda, mulai dari dampak langsung terhadap kegiatan hingga dampak jangka panjang terhadap kinerja pemerintahan. Ketiga

level dampak tersebut adalah Level Mikro, Level Messo dan Level Makro. Berikut penjelasan untuk masing-masing level dampak inovasi.

1. Level Mikro: Dampak Inovasi terhadap Kinerja Kegiatan (Immediate Outcome)

Tingkat Mikro merujuk pada dampak inovasi yang terjadi di level kegiatan atau sub-kegiatan, yang merupakan langkah-langkah operasional langsung yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Inovasi di level ini memiliki dampak langsung dan instan pada kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya, penerapan teknologi baru untuk mempermudah proses administrasi, atau penerapan metode baru dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Immediate outcome atau hasil langsung dari inovasi ini adalah peningkatan efisiensi, kecepatan, atau kualitas pelaksanaan kegiatan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau unit kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam diagram, kegiatan berada di pusat lingkaran terdalam, menunjukkan bahwa kegiatan/sub-kegiatan adalah fokus utama dalam penerapan inovasi ini.

2. Level Messo: Dampak Inovasi terhadap Kinerja OPD (Intermediate Outcome)

Tingkat Messo menunjukkan dampak inovasi yang terjadi di level organisasi perangkat daerah (OPD), tempat di mana inovasi diterapkan secara lebih luas dan sistematis. Inovasi pada level ini mempengaruhi kinerja OPD, yang melibatkan perubahan atau perbaikan dalam proses dan manajemen internal di setiap OPD yang bersangkutan. Ini bisa berupa penerapan sistem baru dalam perencanaan, penganggaran, atau pengelolaan sumber daya. Intermediate outcome atau hasil antara dari inovasi ini adalah peningkatan kapasitas dan kinerja OPD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. OPD yang lebih efektif dan efisien akan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, yang pada akhirnya

mendukung tujuan pembangunan daerah. Dalam diagram, OPD berada di lingkaran kedua yang mengelilingi kegiatan, mencerminkan bahwa OPD memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian kegiatan.

3. Level Makro: Dampak Inovasi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Ultimate Outcome)

Tingkat Makro mencerminkan dampak inovasi yang berskala lebih besar dan berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Inovasi yang diterapkan pada level ini akan menghasilkan dampak jangka panjang yang berpengaruh pada kebijakan dan hasil pembangunan daerah secara lebih luas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas kebijakan pemerintah, atau peningkatan daya saing daerah. Ultimate outcome atau hasil akhir dari inovasi ini adalah tercapainya tujuan jangka panjang dalam visi dan misi pembangunan daerah, yang akan memberikan perbaikan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat dan kemajuan daerah. Dalam diagram, pemerintahan daerah berada di lingkaran terluar, menggambarkan bahwa perubahan di tingkat pemerintahan daerah dipengaruhi oleh kinerja OPD dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

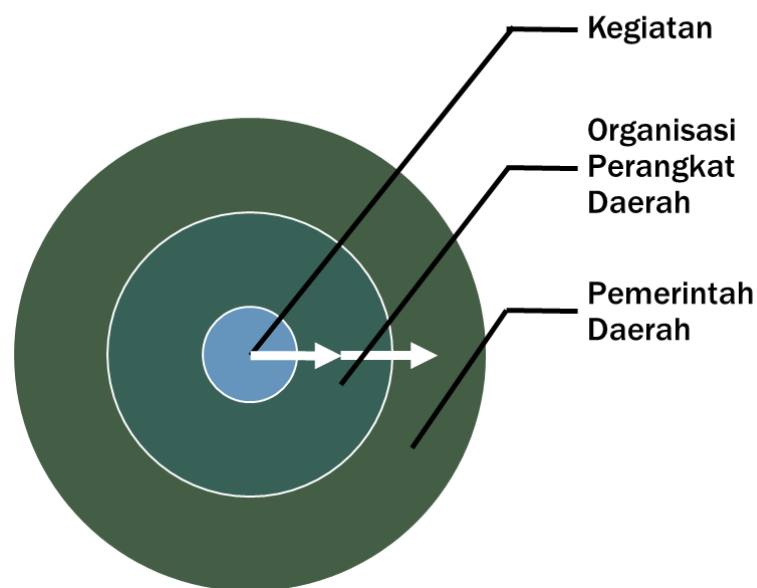
Untuk menggambarkan hubungan antara tiga level dampak inovasi secara visual, diagram lingkaran konsentris dapat digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai diagram tersebut:

- **Lingkaran Terluar: Pemerintahan Daerah.** Menunjukkan bahwa dampak inovasi di level makro akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Pemerintahan daerah memperoleh manfaat dari perbaikan yang terjadi di tingkat OPD dan kegiatan.
- **Lingkaran Kedua: Organisasi Perangkat Daerah (OPD).** Menunjukkan bahwa OPD berada di tengah-tengah inovasi yang

diterapkan, dengan peranannya dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Inovasi di OPD memiliki dampak terhadap kinerja setiap unit kerja, yang mendukung tercapainya tujuan daerah.

- **Lingkaran Terdalam (Terdekat dengan Pusat):** Kegiatan/Sub-Kegiatan. Berada di pusat diagram, menggambarkan bahwa inovasi pertama kali diterapkan pada tingkat operasional, yaitu kegiatan atau sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dampak langsung dari inovasi akan terlihat di sini, berupa peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Hubungan antar Level Dampak Inovasi (Mikro, Messo, dan Makro)



Mengenai perbandingan antara ketiga level pengukuran dampak Level Mikro, Level Messo dan Level Makro, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Perbandingan Antar Level Dampak Inovasi (Mikro, Messo, dan Makro)

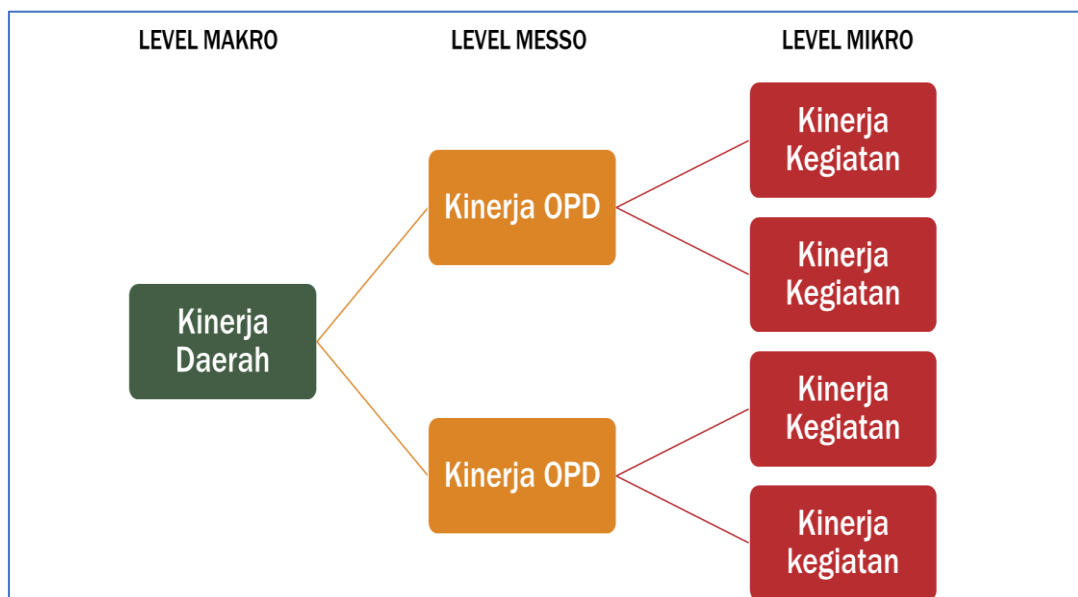
Tinjauan	Level Pengukuran Dampak		
	Mikro	Messo	Makro
Target Hasil Pengukuran	Tingkat Dampak inovasi kegiatan/layanan terhadap capaian indikator kinerja kegiatan/layanan tersebut	Tingkat dampak inovasi terhadap capaian indikator kinerja OPD	Tingkat dampak inovasi terhadap capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah
Obyek Pengukuran	Per satuan Inovasi kegiatan/layanan	Beberapa Inovasi kegiatan/layanan yang menunjang kinerja OPD	Beberapa Inovasi kegiatan/layanan pada beberapa OPD, yang menunjang Kinerja Pemerintah Daerah
Faktor terdampak inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Input kegiatan/layanan • Proses kegiatan/layanan • Output kegiatan/layanan • Outcome kegiatan/layanan (IMMEDIATE OUTCOME), 	INTERMEDIATE OUTCOME <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Kinerja OPD (LKj/Lakip) • Capaian IKU • Capaian SPM OPD (untuk yang telah ada ketetapan SPM-nya) • Capaian IKM OPD • Dll 	ULTIMATE OUTCOME <ul style="list-style-type: none"> • Capaian RPJMD/Visi-Misi • Tingkat IPM Daerah • Laporan Kinerja Daerah • Penyelesaian Masalah/Isu Daerah

- Di Level Mikro, fokus pengukuran ada pada kegiatan operasional yang dilakukan di lapangan dengan target peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan. mengukur dampak inovasi terhadap kinerja kegiatan yang dilakukan. Di sini, pengukuran berfokus pada hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan yang sudah diubah atau diperbaiki dengan inovasi. Obyek pengukurannya adalah kegiatan atau sub-kegiatan itu sendiri.
- Di Level Meso, fokus pengukuran beralih ke kinerja OPD yang melaksanakan kegiatan, dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. berfokus pada dampak inovasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengukuran di level ini menilai sejauh mana inovasi mempengaruhi operasional dan kinerja internal OPD, seperti peningkatan efektivitas manajerial dan pelayanan publik.

- Di Level Makro, pengukuran dilakukan pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, dengan target yang lebih besar yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. mengukur dampak inovasi pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Di level ini, pengukuran bertujuan untuk melihat dampak jangka panjang dari inovasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Penggambaran lain hubungan antara level pengukuran dampak inovasi dapat dijelaskan dengan pendekatan cascading, sebagai berikut.

Cascading Antar Level Dampak Inovasi (Mikro, Messo, dan Makro)



- Pada level mikro, pengukuran dampak inovasi dilakukan terhadap inovasi pada persatuan kegiatan, untuk melihat dampak inovasi terhadap kinerja kegiatan yang diberi sentuhan inovasi tersebut.

- Pada level meso, pengukuran dampak inovasi dilakukan terhadap beberapa inovasi yang dilakukan oleh OPD, untuk melihat dampak beberapa inovasi secara bersama-sama terhadap kinerja OPD.
- Pada level makro pengukuran dampak inovasi dilakukan terhadap beberapa inovasi kegiatan/layanan pada beberapa OPD, untuk melihat dampak beberapa inovasi pada beberapa OPD secara bersama-sama terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

G. Fokus Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro

Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi level mikro yang dikembangkan, akan difokuskan pada variabel dan indikator berdasarkan komponen dalam pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu faktor input, faktor proses, faktor output, dan faktor outcome tingkat 1 (*immediate outcome*), sebagai berikut.

Faktor Terdampak Inovasi pada Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro

Dampak Inovasi bagi operasional Kegiatan (Input – Proses – Output)	Dimensi
Input kegiatan	Kebutuhan sumber daya Anggaran OPD; Personil OPD untuk pelaksanaan kegiatan rutin, jumlah stakeholders terlibat kegiatan,
Proses Kegiatan	Jumlah prosedur pada pelaksanaan kegiatan rutin, waktu yg diperlukan pada setiap tahap prosedur
Output kegiatan	Jumlah produk keluaran/hasil; jumlah penerima produk keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan rutin

Dampak Inovasi Value bagi Masyarakat	Dimensi
Cheaper (lebih murah)	Memangkas/mengurangi biaya
Faster (lebih cepat)	Memangkas/mempercepat waktu
Easier (lebih mudah)	Memangkas/menyederhanakan memperoleh layanan
Smarter (lebih cerdas)	Memperbaiki/mengubah bentuk manual menuju digital

1. Faktor Input Kegiatan, yaitu kebutuhan sumber daya Anggaran OPD; Personil OPD untuk pelaksanaan kegiatan rutin, jumlah stakeholders terlibat kegiatan;
2. Faktor Proses Kegiatan, yaitu Jumlah prosedur pada pelaksanaan kegiatan rutin, waktu yg diperlukan pada setiap tahap prosedur;
3. Faktor Output Kegiatan, yaitu Jumlah produk keluaran/hasil; jumlah penerima produk keluaran/hasil dari pelaksanaan kegiatan rutin; dan
4. Faktor Outcome Kegiatan Tingkat I (Immediate outcome), yaitu Value yang diperoleh/dirasakan oleh Masyarakat penerima layanan atau hasil kegiatan, seperti Cheaper (lebih murah), Faster (lebih cepat), Easier (lebih mudah), dan Smarter (lebih cerdas).

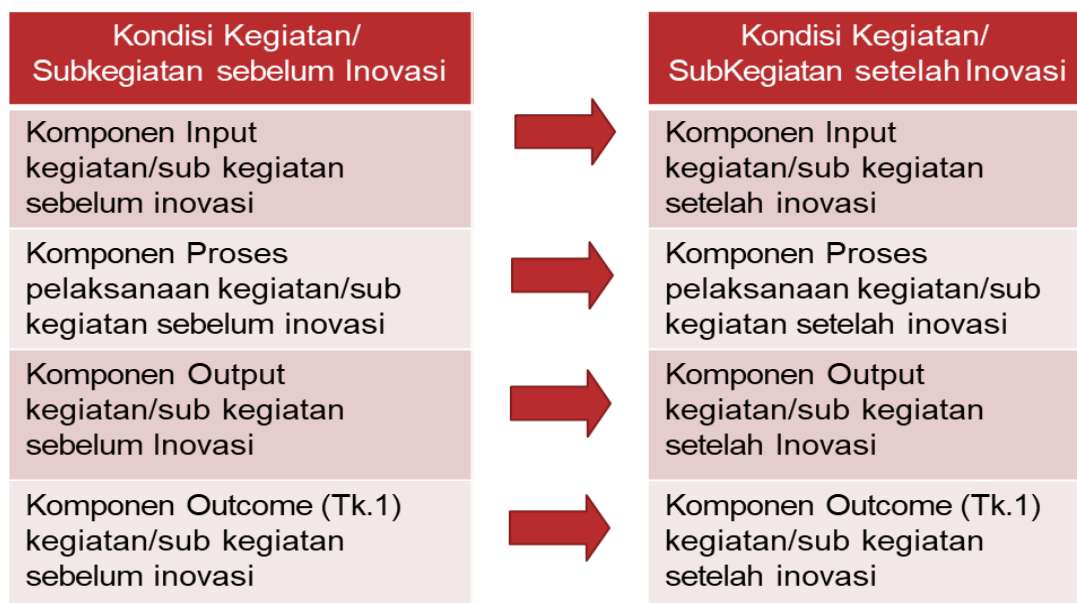
Berdasarkan komponen faktor-faktor kegiatan tersebut, maka dengan demikian setiap inovasi akan diukur dampaknya terhadap setiap Komponen pada Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi:

1. Dampak Inovasi terhadap Komponen Input Kegiatan (yg dirasakan oleh OPD), terdiri atas:
 - 1.1 Jumlah SDM pelaksana kegiatan (internal/eksternal)
 - 1.2 Anggaran pelaksanaan kegiatan
 - 1.3 Jumlah unit organisasi eksternal yang terlibat
2. Dampak Inovasi terhadap Komponen Proses Kegiatan (yg dirasakan oleh OPD), terdiri atas :
 - 2.1 Jumlah Tahapan kegiatan
 - 2.2 Rata-rata lama waktu setiap tahap kegiatan
3. Dampak Inovasi terhadap Komponen Output Kegiatan, terdiri atas:
 - 3.1 Jumlah Produk/jasa yang dihasilkan
 - 3.2 Jumlah orang penerima hasil kegiatan
 - 3.3 Jumlah unit/organisasi penerima hasil kegiatan
4. Dampak Inovasi terhadap Komponen immediate Outcome (outcome Tkt.1) dari Kegiatan, terdiri atas
 - 4.1 Beban biaya yang dikeluarkan penerima hasil kegiatan

- 4.2 Waktu yang diperlukan penerima hasil kegiatan
- 4.3 Syarat yang harus dipenuhi penerima hasil kegiatan
- 4.4 Alternatif cara yang ditempuh untuk memperoleh hasil kegiatan

Prinsip kerja pengukuran dampak inovasi yang digunakan pada instrumen pengukuran dampak inovasi level mikro adalah membandingkan data/informasi kondisi setiap komponen kegiatan saat sebelum diberi sentuhan inovasi dengan kondisi setiap komponen kegiatan saat setelah diberi sentuhan inovasi.

Faktor Terdampak Inovasi pada Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro



Dengan demikian, narasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan hasil pengukuran dampak inovasi pada setiap komponen kegiatan yang diberi sentuhan iniovasi adalah sebagai berikut.

1. Tingkat perubahan kondisi komponen Input Kegiatan antara sebelum dan setelah inovasi, dengan rincian:

- 1.1 Tingkat perubahan jumlah SDM pelaksana kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
- 1.2 Tingkat perubahan perubahan anggaran pelaksanaan kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
- 1.3 Tingkat perubahan jumlah unit organisasi eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi.
2. Tingkat perubahan kondisi Komponen Proses Kegiatan antara sebelum dan setelah inovasi, dengan rincian:
 - 2.1 Tingkat perubahan jumlah tahapan pelaksanaan kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
 - 2.2 Tingkat perubahan Rata-rata lama waktu pelaksanaan pada tahap kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi.
3. Tingkat perubahan kondisi Komponen Output Kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi, dengan rincian:
 - 3.1 Tingkat perubahan jumlah Produk/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
 - 3.2 Tingkat perubahan jumlah orang penerima hasil kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
 - 3.3 Tingkat perubahan jumlah unit/organisasi penerima hasil kegiatan antara sebelum inovasi dan setelah inovasi.
4. Tingkat perubahan kondisi Komponen *immediate Outcome* (*outcome* Tkt.1) dari Kegiatan, dengan rincian:
 - 4.1 Tingkat perubahan beban biaya yang dikeluarkan masyarakat penerima manfaat untuk memperoleh hasil kegiatan, antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
 - 4.2 Tingkat perubahan waktu yang diperlukan masyarakat penerima manfaat untuk memperoleh hasil kegiatan, antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;
 - 4.3 Tingkat perubahan syarat yang diperlukan masyarakat penerima manfaat untuk memperoleh hasil kegiatan, antara sebelum inovasi dan setelah inovasi;

- 4.4 Tingkat perubahan jumlah alternatif cara yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh layanan/hasil kegiatan, antara sebelum inovasi dan setelah inovasi.

H. Deskripsi Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro

Berdasarkan fokus variabel dan indikator kegiatan yang dipilih dalam pengukuran dampak inovasi, maka deskripsi Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi pada level mikro, meliputi bagian-bagian sebagai berikut, yaitu:

1. Identitas Inovasi
2. Lingkup Urusan, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Dari Inovasi (Yang Diberi Sentuhan Inovasi)
3. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Input (Sumber Daya) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
4. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Proses/Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
5. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Output Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
6. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Outcome Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada Kelompok Sasaran Penerima Layanan/hasil kegiatan)

Deskripsi mengenai konten atau informasi pada masing-masing bagian instrumen Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Identitas Inovasi

Pada bagian ini memuat beberapa informasi tentang inovasi yang diukur dampaknya, yang meliputi

1.1 Nama Inovasi

- 1.2 Deskripsi tujuan Inovasi
 - 1.3 OPD Pengelola Inovasi
 - 1.4 Kelompok sasaran inovasi
 - 1.5 Lama Inovasi diimplementasikan
 - 1.6 SK penetapan inovasi
 - 1.7 Bentuk Inovasi (Pilih salah satu)
 - 1.8 Jenis inovasi
 - 1.9 Biaya Pembuatan/ pengembangan Inovasi
2. Lingkup Urusan, Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Dari Inovasi (Yang Diberi Sentuhan Inovasi)
- Pada bagian ini memuat beberapa informasi tentang kegiatan/sub kegiatan yang diberi sentuhan inovasi, yang meliputi
- 2.1 Nama Urusan
 - 2.2 Nama Program
 - 2.3 Nama kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi
 - 2.4 Pernyataan Kinerja kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi
 - 2.5 Indikator kinerja keluaran/output dari kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi
 - 2.6 Satuan keluaran/output dari kegiatan/ subkegiatan
3. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Input (Sumber Daya) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
- Pada bagian ini memuat beberapa informasi tentang Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Input (Sumber Daya) Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi
- 3.1 Jumlah SDM internal OPD penyelenggaraan kegiatan
 - 3.2 Jumlah anggaran penyelenggaraan kegiatan
 - 3.3 Jumlah stakeholders organisasi/lembaga/instansi eksternal OPD, yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan

3.4 Jumlah stakeholders individu eksternal OPD inovator, yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan

4. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Proses/Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada bagian ini memuat informasi tentang Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Proses/Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi:

- 4.1 Jumlah tahapan SOP pelaksanaan kegiatan
- 4.2 Rata-rata lama waktu pelaksanaan setiap tahap SOP kegiatan

5. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Output Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada bagian ini memuat informasi tentang Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Output Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi:

- 5.1 Jumlah orang penerima produk/jasa hasil kegiatan (perbulan/pertahun)
- 5.2 Jumlah unit organisasi/lembaga penerima produk/jasa hasil kegiatan (perbulan/pertahun)
- 5.3 Jumlah produk/jasa keluaran hasil kegiatan (perbulan/pertahun)
- 5.4 Jumlah pendapatan (retribusi/pajak) produk/jasa pada kegiatan (perbulan/pertahun)

6. Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Outcome Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada Kelompok Sasaran Penerima Layanan/hasil kegiatan)

Pada bagian ini memuat informasi tentang Pengaruh/Dampak Inovasi Terhadap Faktor Outcome Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada Kelompok Sasaran Penerima Layanan/hasil kegiatan), yang meliputi:

- 6.1 Beban biaya yang dikeluarkan , untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.2 Jarak untuk menuju lokasi tempat pemberian layanan/ hasil kegiatan (dari rumah ke titik layanan terdekat), untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.3 Waktu tempuh untuk menuju lokasi tempat pemberian layanan/ hasil kegiatan (dari rumah ke titik layanan terdekat), untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.4 Kecepatan mendapatkan layanan/hasil kegiatan, untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.5 Persyaratan yang harus dipenuhi, untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.6 Prosedur yang harus ditempuh/dilalui , untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan
- 6.7 Cara atau metode yang bisa digunakan, untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan

Gambaran secara lengkap mengenai form Instrumen bantu Pengukuran Dampak Inovasi level Mikro,d apat dilihat dalam tabel berikut.

Form Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro**Definisi operasional:**

Pengukuran Dampak Inovasi Level Mikro adalah untuk melihat pengaruh inovasi terhadap faktor input, proses, dan output pada suatu kegiatan/subkegiatan, serta outcome/ manfaat yang dirasakan kelompok sasaran penerima hasil/output dari kegiatan/subkegiatan yang diberi sentuhan inovasi)

A IDENTITAS INOVASI			
	Butir Informasi	Jawaban	Petunjuk Pengisian
1	Nama Inovasi		Tuliskan judul inovasi yang akan diukur dampak inovasinya terhadap Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Deskripsi tujuan Inovasi		Uraikan secara singkat gagasan maksud dan tujuan inovasi ini
3	OPD Pengelola Inovasi		Tuliskan nama OPD atau nama UPT yang menginisiasi atau memiliki inovasi ini
4	Kelompok sasaran inovasi		Tuliskan kelompok sasaran inovasi
5	Lama Inovasi diimplementasikan		Tuliskan usia inovasi sejak mulai dilaksanakan sampai dengan saat ini,
6	SK penetapan inovasi		Tuliskan nomor dan tanggal SK penetapan inovasi (SK UPT/OPD/Kepala Daerah)
7	Bentuk Inovasi (Pilih salah satu)		Tuliskan bentuk inovasi berdasarkan PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
8	Jenis inovasi		Tuliskan jenis Inovasi apakah digital atau non digital
9	Biaya Pembuatan/ pengembangan Inovasi		Tuliskan biaya yang diperlukan untuk pembangunan/ pengembangan inovasi (Rp).

B LINGKUP URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN DARI INOVASI (YANG DIBERI SENTUHAN INOVASI)			
No	Butir Informasi	Jawaban	Petunjuk
1	Nama Urusan		Tuliskan lingkup URUSAN yang sesuai dengan inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor
2	Nama Program		Tuliskan lingkup PROGRAM yang sesuai dengan inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor
3	Nama kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi		Tuliskan lingkup KEGIATAN/SUBKEGIATAN yang menjadi payung dari inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
4	Pernyataan Kinerja kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi		Tuliskan pernyataan kinerja dari KEGIATAN/SUBKEGIATAN yang menjadi payung dari inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
5	Indikator kinerja keluaran/output dari kegiatan/subkegiatan yang menjadi payung inovasi		Tuliskan lingkup INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN yang sesuai dengan inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
6	Satuan keluaran/output dari kegiatan/subkegiatan		Tuliskan SATUAN KELUARAN/OUTPUT KINERJA KEGIATAN/SUBKEGIATAN yang sesuai dengan inovasi ini. Sesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

C PENGARUH/DAMPAK INOVASI TERHADAP FAKTOR INPUT (SUMBER DAYA) PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
No	Opsi Variabel/Indikator	Satuan	Sebelum adanya Inovasi	Setelah adanya Inovasi	Tingkat perubahan	Narasi
1	Jumlah SDM internal OPD penyelenggaraan kegiatan	Orang			#DIV/0!	
2	Jumlah anggaran penyelenggaraan kegiatan	Rp			#DIV/0!	
3	Jumlah stakeholders organisasi/lembaga/instansi eksternal OPD , yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan	unit/organisasi			#DIV/0!	
4	Jumlah stakeholders individu eksternal OPD inovator, yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan	orang			#DIV/0!	

D PENGARUH/DAMPAK INOVASI TERHADAP FAKTOR PROSES/MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
No	Opsi Variabel/Indikator	Satuan	Sebelum adanya Inovasi	Setelah adanya Inovasi	Tingkat perubahan	Narasi
1	Jumlah tahapan SOP pelaksanaan kegiatan	langkah			#DIV/0!	
2	Rata-rata lama waktu pelaksanaan setiap tahap SOP kegiatan	menit/jam/hari			#DIV/0!	

E PENGARUH/DAMPAK INOVASI TERHADAP FAKTOR OUTPUT PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN						
No	Opsi Variabel/Indikator	Satuan	Sebelum adanya Inovasi	Setelah adanya Inovasi	Tingkat perubahan	Narasi
1	Jumlah orang penerima produk/jasa hasil kegiatan (perbulan/pertahun)	orang			#DIV/0!	
2	Jumlah unit organisasi/lembaga penerima produk/jasa hasil kegiatan (perbulan/pertahun)	unit/organisasi			#DIV/0!	
3	Jumlah produk/jasa keluaran hasil kegiatan (perbulan/pertahun)	barang/jasa			#DIV/0!	
4	Jumlah pendapatan (retribusi/pajak) produk/jasa pada kegiatan (perbulan/pertahun)	Rp			#DIV/0!	

F PENGARUH/DAMPAK INOVASI TERHADAP OUTCOME KEGIATAN/SUB KEGIATAN (PADA KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN/HASIL KEGIATAN)						
No	Opsi Variabel/Indikator	Satuan (Utk perizinan, non prizinan)	Sebelum adanya Inovasi	Setelah adanya Inovasi	Tingkat perubahan	Narasi
1	Beban biaya yang dikeluarkan , untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	Rp			#DIV/0!	
2	Jarak untuk menuju lokasi tempat pemberian layanan/ hasil kegiatan (dari rumah ke titik layanan terdekat), untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	km			#DIV/0!	
3	Waktu tempuh untuk menuju lokasi tempat pemberian layanan/ hasil kegiatan (dari rumah ke titik layanan terdekat), untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	menit/jam/hari			#DIV/0!	
4	Kecepatan mendapatkan layanan/hasil kegiatan , untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	menit/jam/hari			#DIV/0!	
5	Persyaratan yang harus dipenuhi, untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	Jumlah dokumen/berkas persyaratan			#DIV/0!	
6	Prosedur yang harus ditempuh/dilalui , untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	Jumlah meja/prosedur birokrasi			#DIV/0!	
7	Cara atau metode yang bisa digunakan, untuk mendapatkan layanan atau hasil kegiatan	Jumlah cara/saluran			#DIV/0!	

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara yang pada Tahun 2024 difokuskan pada Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi, telah menghasilkan capaian akhir berupa Direktori Inovasi, dan Instrumen Pengukuran Dampak Inovasi (Leve Mikro). Kedua capaian tersebut merupakan satu paket rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk terus mendorong pengembangan inovasi daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara pada Tahun 2024 tersebut, direkomendasikan pada Pemerintah untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan bahan ekosistem pengetahuan inovasi yang telah dihasilkan untuk diimplementasikan untuk mendorong dan percepatan pengembangan inovasi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarluaskan dan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan bahan-bahan ekosistem pengetahuan inovasi yang telah ada.
2. Menyiapkan bahan lain terkait ekosistem pengetahuan inovasi yang belum tersedia. Hal ini dilakukan dengan menyusun direktori inovasi

atas inovasi-inovasi lainnya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah,

3. Mendorong pemanfaatan instrumen pengukuran dampak inovasi untuk mengidentifikasi dampak inovasi yang telah dihasilkan oleh instansi pemerintah, sebagai salah bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kemanfaatan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN